



**PERANAN MUAWIYAH BIN ABU SUFYAN DALAM PERKEMBANGAN
PERADABAN ISLAM**

Tesis Diajukan Untuk melengkapi salah satu syarat

Guna memperoleh gelar Magister Humainora (M. Hum)

Dalam program studi Sejarah Peradaban Islam

Konsentrasi Politik Islam

Oleh

QURRATA A'YUN

NIM: 100301150

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RAEN FATAH PALEMBANG

2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegemilangan Islam setelah era Rasulullah SAW dan KhulafaurRasyidin wafat tidak dapat dilepaskan dari sebuah dinasti yang selama hampir 90 tahun kekuasaannya mampu melakukan ekspansi hingga ke dataran Eropa dan Asia Selatan. Perluasan wilayah penyebaran Islam yang semula tidak terlalu ekspansif, pada masa Bani Umayyah justru menyebar sedemikian cepat dan luasnya. Meskipun sejarah Bani Umayyah tidak lepas dari kontroversi terutama mengenai peristiwa perpecahan di tubuh komunitas Muslim sendiri akibat adanya konflik dengan para keturunan Nabi Muhammad SAW, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kegemilangan Islam di berbagai bidang justru dimulai di era dinasti ini (Yatim, 2000 : 30).

Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka berakhirilah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan kepada wahyu Illahi. Itulah prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang menjadi tumpuan dan arah sistem pemerintahan pada masa Nabi Muhammad SAW.

Menjelang kematiannya, Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa di antara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Kendati Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk seorang khalifah (pengganti), namun tokoh-tokoh dalam masyarakat Muslim yang mengetahui benar Islam menuntut adanya kekhalifahan yang didasarkan atas

musyawarah, maka tidak satu keluarga pun yang memonopoli pemerintahan, dan tidak seorang pun yang merampas kekuasaan dengan kekuatan atau paksaan, dan tidak seorang pun mencoba untuk memuji dirinya atau memaksakan pribadinya guna mencapai kedudukan khalifah. Akan tetapi masyarakat pada waktu itu dengan sukarela telah memilih empat para sahabat Nabi untuk diangkat sebagai khalifah, yang kemudian diangkat secara bergiliran(Al-Maududi, 1998: 111).

Kata khilafah sendiri berasal dari kata khalafah (jamak), yang berarti seorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Istilah khilafah adalah sebutan bagi suatu masa pemerintahan khalifah. Dalam sejarah, khilafah sebutan bagi suatu pemerintahan yang pada masa tertentu, seperti Abu Bakar, Umar bin Khatab, dan seterusnya. Dengan demikian kata khilafah mengalami perkembangan arti menjadi pemerintahan. Perkembangan arti ini tidak terlepas dari sejarah Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat di mana terdapat pemimpin yang terpilih, yang mempunyai kewenangan mengatur masalah agama dan politik. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah pada tahun 11 Hijriah (632M), tugas-tugas agama dan kenegaraan kemudian diteruskan oleh para penggantinya (Ajid Thohir,2004:112).

Tidak lama setelah beliau wafat, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah tersebut berlangsung alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Anshar, merasa berhak untuk menjadikan wakil-wakilnya sebagai pemimpin umat Islam(Yatim,2000: 35).

Fase pertama pembentukan rezim khalifah adalah periode Khulafaur Rasyidin, mereka adalah sahabat-sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar (632 M – 634 M), Umar bin Khattab (634 – 644 M), Usman bin Affan (644-656 M), dan Ali bin Abi Thalib (656 – 661 M) yang menjalankan roda pemerintahan yang berasal dari ketokohan dan kesetiaan umat terhadap Islam. Kekhalifahan awal secara politik didasarkan pada komunitas Muslim Arabia dan pada kekuatan kesukuan bangsa Arab yang mulai meluaskan penyebaran Islam di Timur Tengah (Ladipus,1999:82).

Periode pemerintahan Abu Bakar berlangsung singkat, hanya selama dua tahun lebih. Ia mampu mengamankan negara baru Islam dari perpecahan dan kehancuran, baik di kalangan sahabat mengenai persoalan pengganti Nabi maupun tekanan-tekanan dari luar. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang mulai tidak tunduk lagi kepada pemerintahan Madinah. Pada 634 M beliau wafat (Karim, 2007 : 78).

Pemerintahan yang dijalankan oleh Abu Bakar bersifat sentralistik. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada di tangan khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga menjaga terlaksananya hukum Islam. Meski demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar serta merta mengajak para sahabat untuk bermusyawarah (Yatim, 2000 : 36).

Setelah khalifah Abu Bakar wafat, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab gelombang perluasan wilayah Islam untuk pertama kalinya mulai dijalankan. Penaklukan di berbagai daerah berlangsung cepat, karena itu Umar menyegerakan pengaturan administrasi

negara dengan mencontoh pola administrasi yang sebelumnya sudah berkembang di Persia. Administrasi wilayah diatur menjadi delapan wilayah propinsi yaitu Mekah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufa, Palestina, dan Mesir.

Pada masanya pula mulai diatur sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, maka dibentuklah jawatan kepolisian. Umar memerintah selama sepuluh tahun, dari tahun 634 – 644 masehi.

Masa jabatan beliau diakhiri dengan peristiwa pembunuhan yang menimpa dirinya. Umar dibunuh oleh seorang budak dari Persia yang bernama Fairuz atau dikenal juga sebagai Abu Lu'lu'a. Ketika tengah sekarat akibat enam hujaman pisau dari Abu Lu'lu'a, Umar masih sempat memberikan amanat mengenai siapa yang akan menggantikannya. Beliau menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah satu di antaranya menjadi khalifah (Yatim, 2000 : 38).

Setelah wafatnya Umar bin Khattab, maka atas persetujuan para sahabat dipilihlah Usman bin Affan (644 – 655 M), sebagai khalifah berikutnya. Pemerintahan Usman berlangsung selama dua belas tahun. Di masa pemerintahan Usman lah, riak-riak perpecahan komunitas Islam mulai membesar. Muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan khalifah Usman bin Affan memang cukup berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya, di mana orang-orang terdekat khalifah Usman mendapat kewenangan yang cukup besar untuk menjalankan pemerintahan. Hal

ini terkait dengan usia khalifah Usman yang cukup tua. Beliau diangkat sebagai khalifah pada umur 70 tahun.

Terlebih, setelah banyak kerabat Usman yang karena kekerabatannya tersebut mendapatkan berbagai jabatan di pemerintahan, semakin memunculkan banyak kekecewaan dari banyak golongan. Penghamburan harta dan kekayaan negara dituduhkan kepada keluarga Usman yang banyak berada di tampuk kekuasaan. Pada akhirnya kekecewaan tersebut puncaknya terjadi dengan terbunuhnya Usman oleh pemberontak yang sempat mengepung kediamannya (Yatim, 2000 : 38).

Setelah Usman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali Bin Abi Thalib sebagai khalifah. Menempatkan Ali sebagai khalifah sebenarnya telah lama dinantikan oleh banyak umat, namun karena proses negosiasi politik dan pertimbangan lainnya pada akhirnya baru setelah Usman bin Affan wafat, Ali baru bisa menduduki posisi khalifah. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib (655 – 661 M) perpecahan di kalangan umat Islam semakin membesar. Tercatat selama pemerintahannya tersebut beliau mesti berperang melawan kelompok Thalhah, Zubair, dan istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah. Pertempuran yang dahsyat pun berkobar, dikenal sebagai Perang Jamal. Ali dan pasukannya mampu memenangkan pertempuran itu. Zubair dan Thalhah terbunuh ketika hendak melarikan diri, sementara Aisyah berhasil ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Tidak lama setelah konflik dengan Aisyah mereda, segera muncul pemberontakan dari penguasa Damaskus, Muawiyah bin Abu Sufyan (Yatim,2000:40).

Pertempuran antara pasukan Ali dan Muawiyah terjadi dalam Perang Siffin, diambil dari nama daerah pertempuran tersebut terjadi. Dalam pertempuran ini Muawiyah hampir mengalami kekalahan, namun dengan kecerdikannya Muawiyah mengajukan gencatan senjata dan mengajak Ali ke meja perundingan untuk kembali merundingkan status kekhalifahan Ali. Peristiwa ini dikenal sebagai *tahkim (Arbitrase)* yang berlangsung di Daumatul Jandal. Musyawarah ini nyatanya tidak menyelesaikan masalah, bahkan memunculkan golongan baru yang keluar dari barisan Ali. Golongan inilah yang kemudian disebut sebagai Khawarij.

Kini ada tiga pihak yang saling berkonflik, yakni Ali, Muawiyah, dan kaum Khawarij. Kondisi ini tidak menguntungkan Khalifah Ali bin Abi Thalib karena selain kedudukannya yang semakin terancam, umat Islam pun dibingungkan dengan adanya konflik ini. Puncaknya pada 20 Ramadhan 40 H (660 M), Khalifah Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam, salah seorang dari golongan Khawarij. Dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib maka berakhirilah masa KhalifaurRasyidin.

Kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan bin Ali selama enam bulan. Pembaiatan Hasan tidak bisa menyatukan umat Islam karena di pihak lain masih ada Muawiyah yang kekuasaannya semakin menguat. Perselisihan di antara umat Islam semakin menjadi-jadi di masa Hasan menduduki posisi khalifah. Pada akhirnya untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, Hasan bin Ali bersedia mengundurkan diri dan melakukan perjanjian damai dengan Muawiyah pada Rabiul Awal 41 H / 661 M di Kufah. Tahun ini sering disebut sebagai tahun persatuan (*amul-jama'ah*), karena kaum muslimin sepakat menempatkan satu orang sebagai pemimpin tunggal sebagai mana yang

dimaksudkan Hasan bin Ali atas pengunduran dirinya. Dengan adanya perjanjian damai dan ditempatkannya Muawiyah mengganti Hasan bin Ali, maka Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi penguasa politik Islam (Nizar,2008: 55).

Pusat pemerintahan kemudian dipindahkan ke Damaskus, di mana sebelumnya merupakan pusat kekuasaan Muawiyah sejak menjabat sebagai gubernur Syiria dan Palestina. Dari Damaskus, Bani Umayyah menyempurnakan perluasan Islam dengan menaklukkan seluruh Imperium Persia dan sebagian Imperium Bizantium. Pada masa Mu'awiyah bin Abu Sufyan, umat Islam dengan panglimanya Uqbah bin Nafi dan dibantu suku Barbar, mengalahkan tentara Bizantium di Afrika Utara. Mereka juga mendirikan Qairawan, di negara Maroko sekarang, sebagai pusat pemerintahan Islam di Afrika pada tahun 670 M. Ke arah timur, umat Islam menguasai Khurasan dan Afganistan. Angkatan lautnya menyerang Bizantium di Konstantinopel.

Muawiyah juga adalah khalifah yang pertama kali mengubah pemerintahan menjadi sistem monarki (*sultane/kingship*). Beliau juga pernah berkata bahwa ialah sultan pertama diantara para sultan Arab lainnya. Model penentuan khalifah tersebut, banyak menuai protes dari rakyat kebanyakan, ketika Muawiyah berangkat ke Mekkah dan Madinah untuk meminta legitimasi (restu) dari rakyat, kebanyakan rakyat meprotes model tersebut, tapi Muawiyah tidak gentar sehingga pergantian khalifah setelah beliau wafat adalah menurunkan tahta kekuasaan kepada anaknya, yang selanjutnya menjadi tradisi turun-temurun pada Dinasti Bani Umayyah (Fa'al,2008 :4).

Tokoh Muawiyah cukup kontroversi dalam sejarah, namun tidak dapat dipungkiri banyak juga pujian yang dialamatkan kepada beliau sebagai politikus

ulung. Nicholsan dalam bukunya *Literaty History of The Arabs* menulis jika Muawiyah adalah seorang diplomat yang cakap membandingkan kegemilangannya berpolitik dengan Richelieu, dan ketegasannya dengan Oliver Cromwell, politikus dan protektor Inggris yang termasyhur, yang pernah membubarkan parlemen Inggris.

Penelitian ini berangkat dari begitu menariknya kisah Muawiyah dalam perjalanan sejarah umat Islam. *Pertama*, karena beliau dikenal sebagai tokoh yang kontroversial terutama dalam kiprahnya sebagai salah satu pemimpin Islam terkemuka dan terkait dalam konflik politik perebutan kekuasaan dengan Ali Bin Abi Thalib yang akhirnya melahirkan tradisi baru dalam sistem pemerintahan Islam yang berbasiskan kepada dinasti. *Kedua*, sistem pemerintahan beliau diyakini banyak memberikan pengaruh perubahan dalam peradaban Islamselanjutnya, terutama di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, beranjak dari ketertarikan tersebut, maka penelitian ini diberi judul “Peranan Muawiyah bin Abu Sufyan Dalam Perkembangan Peradaban Islam.

B. Rumusan Masalah

Pada bagian latar belakang telah dipaparkan secara singkat kisah mengenai Muawiyah bin Abu Sufyan. Penentuan objek penelitian ini didasarkan atas permasalahan yang akan dibahas dan dirumuskan dalam pertanyaan berikut ini :

1. Bagaimana kekuasaan dan peran Muawiyah bin Abu Sufyan ketika menjadi khalifah pertama pada Dinasti Umayyah ?
2. Bagaimana kontribusi khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan dalam perkembangan peradaban Islam dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui kekuasaan dan peranan Muawiyah bin Abu Sufyan ketika menjadi khalifah pertama pada Dinasti Umayyah.
- 2) Untuk mengetahui peranan dan kontribusi khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan dalam perkembangan peradaban Islam dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui peranan Muawiyah dalam perkembangan sejarah peradaban Islam. Oleh karena itu secara akademis dan teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang baru dalam studi sejarah peradaban Islam dan juga upaya dalam pengembangan ilmu terutama yang berkaitan dengan judul tesis ini. Selain itu juga dapat memberikan kontribusi dan pengembangan wawasan keilmuan mengenai peranan Muawiyah

dan kontribusi apa saja yang dilakukan oleh Muawiyah selama menjadi khalifah bani Umayyah.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau rujukan untuk menganalisa sejarah perkembangan kekuasaan Islam pada masa periode Muawiyah (661-680M). Selain itu juga, penelitian ini merupakan sumbangan intelektual dan informasi yang baru bagi siapa saja yang tertarik ingin mengetahui tentang Peranan Muawiyah Bin Abu Sufyan terutama dalam perkembangan peradaban Islam.

E. Definisi Konseptual

1. Peranan, adalah fungsi yang dijalankan oleh seseorang terkait dengan posisi atau kedudukan yang dimilikinya dan mempunyai pengaruh dalam struktur sosial maupun politik terhadap suatu perubahan yang akan terjadi selanjutnya. Peranan yang dimaksudkan disini adalah Peranan politik dari Muawiyah bin Abu Sufyan.
2. Kontribusi, menurut istilah dalam Kamus Bahasa Indonesia secara teknis didefinisikan sebagai “sumbangan” atau “pemberian”. Kontribusi yang dimaksudkan dalam penelitian tesis ini, merujuk kepada sumbangan dari pemerintahan Dinasti Umayyah terutama pada masa kepemimpinan Muawiyah Bin Abu Sufyan terutama pada bidang politik, ekonomi, dan budaya yang sifatnya ditujukan kepada khalayak masyarakat / publik yang idealnya untuk memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi masyarakat pada masa itu.

3. Perkembangan, adalah serangkaian proses sesuatu yang berkesinambungan yang terjadi pada dinamika kehidupan sosial yang menuju kepada pertambahan nilai, sehingga menyebabkan perubahan terhadap kehidupan sosial sebelumnya. Perkembangan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah perkembangan pemerintahan Dinasti Umayyah selama kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan baik yang menciptakan pengaruh positif, maupun pengaruh negatif
4. Peradaban, menurut istilah umum adalah hasil dari kebudayaan yang mengacu kepada cara berpikir, cara pandang dari manusia yang kemudian termapankan dan dimanifestasikan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi maupun teknologi yang tujuannya untuk memudahkan dan mensejahterakan hidup masyarakatnya. Peradaban yang dimaksud dalam tulisan ini, adalah peradaban Islam, sebagai peradaban yang tidak hanya mengacu kepada kebudayaan dan kehidupan sosial, politik, ekonomi yang sudah mapan, tetapi juga peradaban yang bersandar pada kesopanan, akhlak, tata krama dan juga kesesuaian lainnya yang diatur sesuai syariat Islam.

F. Tinjauan Pustaka

Sebenarnya sudah banyak sekali referensi yang terkait dengan kepemimpinan Muawiyah Bin Abu Sufyan terkait masa pemerintahannya pada Dinasti Bani Umayyah. Referensi tersebut sebagian besar telah ditulis dalam bentuk buku baik yang mengkritisi ataupun yang menyanjung kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Salah satunya adalah karangan Abul A'la Al-

Maududi yang berjudul “*Khilafah dan Kerajaan Evaluasi Kritis Terhadap Sejarah Pemerintahan Islam*” (Tahun 1998). Dalam buku tersebut Abul A’la Al-Maududi begitu mengkritisi tentang pribadi Muawiyah Bin Abu Sufyan sebagai seseorang yang telah memberikan pengaruh negatif terhadap perubahan terbesar wajah pemerintahan Islam sebelumnya. Pemerintahan Islam pada masa Dinasti Umayyah dinilai oleh Maududi sebagai kemunduran sejarah Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW, melalui pemerintahan yang adil dan bijaksana dengan pergantian kepemimpinan (khalifah) berdasarkan musyawarah masyarakat, sedangkan Muawiyah meraih tampuk kekuasaan melalui cara-cara yang licik dan selalu membuat bid’ah untuk memuluskan keinginannya¹, termasuk juga seperti mengubah tata cara pelaksanaan diyat dan propaganda terhadap Ali Bin Abi Thalib yang sudah wafat dengan mengumpat dan mencaci maki. (Maududi,1998)

Kritik terhadap Muawiyah juga dilontarkan oleh A. Hasjmy dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Kebudayaan Islam*. Menurutnya, bahwa kemunculan Dinasti Umayyah sebagai peristiwa besar dalam sejarah Islam yang menandai perubahan sistem kepemimpinan yang menyimpang dari dasar-dasar kepemimpinan “syura” yang telah lama digariskan oleh Rasulullah SAW. Lebih frontal A.Hasjmy mengidentikkan pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai kekuasaan masa Jahiliyyah yang selalu memakai tipu daya dalam menjalankan tujuan politiknya terutama dalam menghamburkan uang negara.

¹Kekuasaan Islam di tangan Muawiyah dinilai bukan sesuatu yang mendapat persetujuan dari kaum muslimin pada masa itu, Muawiyah tidak memberikan kewenangan terhadap musyawarah yang menjadi tradisi pemerintahan Islam pada masa Rasulullah Saw dan khalifah Rasyidah (khalifah yang adil dan bijaksana) dalam mencari pemimpin yang sesuai kehendak kaum muslimin, karena Muawiyah sendiri sangat menginginkan menjadi khalifah dengan cara apapun termasuk berperang dengan kekuatan pedangnya, akibatnya rakyat terpaksa memilih Muawiyah demi ketertiban dan keamanan agar perang yang ditimbulkan oleh Muawiyah dapat dihentikan.

Selain itu akibat kepemimpinan Muawiyah juga memberikan kontribusi terhadap perpecahan bangsa Arab dengan politik kasta²(A.Hasjmy,1973).

Hal senada juga diungkap oleh Badri Yatim dalam karyanya yang berjudul “*Sejarah Perdaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Menurut Yatim, bahwa kekuasaan Bani Umayyah melalui peran sentral dari Muawiyah Bin Abu Sufyan mengubah kekuasaan demokrasi Islam menjadi monarki (kerajaan turun-temurun) Muawiyah juga dikatakan mengkhianati perjanjian yang telah disepakati dengan Hasan Ibnu Ali dan kaum muslimin, yaitu berjanji apabila dia tidak berkuasa lagi, maka pemimpin setelahnya akan dipilih sesuai dengan keinginan seluruh kaum muslimin berdasarkan musyawarah, akan tetapi dengan otoriter Muawiyah mengangkat anaknya Yazid³ untuk naik tahta sehingga menyebabkan terjadinya perang saudara (Yatim, 2000).

Pandangan berbeda dikemukakan oleh Prof. Ahmad Syalabi dalam karyanya yang *Sejarah Kebudayaan Islam 2*. Dia memberikan pujian dengan menyebut masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai suatu era yang agresif dimana perhatiannya tertuju pada perluasan wilayah dan penaklukan⁴ yang terhenti pada masa khalifaur Rasyidin. Muawiyah dinilai berhasil juga melakukan

²Politik kasta yang dimaksud adalah doktrin fanatik Arab dengan memberikan pengutamaan terutama terhadap kaum Quraisy atas suku-suku lainnya, yang menyebabkan timbulnya kemarahan dalam kalangan kabilah-kabilah Arab yang lain. Sedangkan dalam lingkungan kaum Muslimin, orang-orang Arab ditempatkan pada derajat yang tinggi, untuk membedakannya kaum Muslimin yang bukan Arab dijuluki dengan sebutan *Al Mawaly*, yaitu julukan yang sebenarnya ditujukan untuk budak-budak tawanan perang yang telah dimerdekakan. hal tersebut juga menyebabkan kemarahan bagi kaum muslimin yang bukan Arab (non Arab) sebagai ejekan yang mendiskriminasikan.

³Pengangkatan Yazid sebagai putra mahkota, dianggap sebagai pembangkangan Muawiyah Bin Abu Sufyan pada perjanjian yang telah disepakati. Ketika Yazid naik tahta sejumlah tokoh di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya. Yazid dengan sengaja mengirim surat kepada gubernur Madinah agar memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya, kecuali Husein ibn Ali dan Abdullah Bin Zubair. Sehingga dikemudian hari menyulut peperangan antara kubu Bani Umayyah dan kubu Husein ibn Ali yang dikenal dengan istilah perang Karbala.

⁴Dalam jangka waktu 90 tahun, upaya penaklukan yang dilakukan Dinasti Umayyah menuai perkembangan bangsa-bangsa yang dikatakan berada dalam empat penjuru mata angin berhasil masuk kedalam wilayah kekuasaan Dinasti Umayyah dari Spanyol, Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina, sebagian daeran Anatolia, Irak, Persia, Afganistan, India, Tukmenistan, Uzbekistan, dan Soviet Rusia.

penaklukan militer melawan bangsa Romawi hingga pengepungan ke Konstantinopel, penaklukan di Afrika Utara dengan menyeberangi Selat Gibraltor hingga bisa menduduki Spanyol dan penaklukan hingga ke India (Ahmad Syalabi, 1963).

Senada dengan Prof. Ahmad Syalabi, Syed Mahmudunnasir juga memuji Muawiyah Bin Abu Sufyan melalui buku karangannya yang berjudul *Islam Konsepsi dan Sejarahnya (Tahun 2003)*, beliau menjelaskan bahwa Muawiyah adalah seorang penguasa, politikus dan administrator dan seorang ahli pidato yang ulung. Muawiyah juga sangat berjasa dalam membentuk angkatan darat yang kuat dan efisien dengan mengandalkan pasukan dari orang-orang Siria yang taat dan loyal serta mengadopsi pemerintahan Byzantium sebagai model sistem di pemerintahan Dinasti Umayyah (Mahmudunnasir, 2003).

Begitu pun dengan buku karangan DR. Yusuf Qardhawi, yang berjudul *Meluruskan Sejarah Umat Islam (Tahun 2005)*. Sesuai dengan judul bukunya, Yusuf Qardhawi mencoba menjelaskan dan berusaha meluruskan stigma negatif yang telah dilabelkan kepada pemerintahan Dinasti Umayyah terutama ketika kepemimpinan Muawiyah Bin Abu Sufyan, lewat penjelasan ilmiahnya, Yusuf mengatakan stigma negatif yang dialamatkan untuk membaca kepemimpinan Muawiyah Bin Abu Sufyan serta warisannya peradabannya terhadap sejarah Islam, adalah sebuah distorsi dan kebohongan yang dibuat oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan menanam kebencian kepada Islam (Yusuf Qardhawi, 2005).

Dari berbagai referensi yang diuraikan diatas, secara umum telah memberikan sebagian informasi tentang Muawiyah bin Abu sufyan dan

beberapa peranannya dalam pemerintahan di Dinasti Umayyah, tetapi yang menarik untuk dikaji lebih khusus lagi dan berusaha menjadi fokus dalam penelitian ini selain kepada peranan Muawiyah bin Abu Sufyan (661-680) dalam perkembangan peradaban Islam, adalah mengenai pribadi Muawiyah bin Abu Sufyan sendiri, yang luput dari bahasan berbagai referensi tersebut. Kebanyakan referensi tidak terlalu detail menceritakan tentang profil dari Muawiyah, dari sosoknya hingga proses terbentuknya pemikiran intelektualnya yang melatarbelakangi wacananya terhadap perebutan kekuasaan Islam pada masa itu, porsi yang banyak dibahas justru naiknya Muawiyah menjadi pemimpin di Dinasti Bani Umayyah, konflik perebutan kekuasaan dengan kubu Ali bin Abi Thalib, serta kontroversinya hidupnya sebagai salah seorang khalifah di Dinasti Umayyah. Berangkat dari berbagai referensi tersebut penulis akan mencoba menggali kembali tentang sosok Muawiyah bin Abu Sufyan tidak hanya dari peranan dan kontribusinya terhadap pemerintahan di Dinasti Umayyah, akan tetapi juga kepribadiannya serta proses pemikiran intelektualnya yang menyebabkan Muawiyah Bin Abu Sufyan menjadi salah satu pengukir dalam sejarah peradaban Islam klasik.

G. Kerangka Teori

1. Kekuasaan

Kekuasaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang terdapat dalam diri manusia atau sekelompok manusia yang dapat mempengaruhi tingkah laku orang atau sekelompok orang lain dalam interaksinya yang dilakukan secara aktif dapat menimbulkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan keinginan

yang terdapat pada orang atau sekelompok yang berkuasa itu. Jadi kekuasaan ini pada intinya merupakan gejala masyarakat yang muncul dalam berbagai bentuk yang kondusif dalam kehidupan bersama (Faturrohman&Sobri, 2002:22).

Menurut Ossip K Fletheim, pada dasarnya kekuasaan berupa interaksi dan kemampuan diri dari seseorang atau sekelompok orang dalam hubungan-hubungannya dan proses-prosesnya dengan menghasilkan suatu ketaatan dari pihak lain secara aman dan mencapai sasaran tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh si pemegang kekuasaan (Fletheim,1992:15).

Kekuasaan pada dasarnya melekat secara intern pada diri manusia sebagai manusia politik (*Zoon Politicon*). Jadi setiap manusia secara mendasar akan memiliki keinginan yang mutlak tentang kekuasaan, paling tidak seseorang akan menjadi penguasa bagi dirinya sendiri, keluarga, organisasi, sampai dalam cakupan kekuasaan yaitu negara.

Dalam kajian ilmu politik, kekuasaan merupakan aktivitas yang selalu mendapat sorotan yang tajam, karena kekuasaan akan terkait dengan kemampuan mengendalikan baik secara langsung (melalui perintah), maupun tidak langsung (melalui penggunaan infrastruktur dan rekayasa politik). Menurut bentuknya kekuasaan di bagi menjadi lima bentuk, yaitu (Budiarjo,1977: 37), yaitu :

1. *Coercive Power* (kuasa paksaan), adalah kemampuan untuk menghukum atau memperlakukan seseorang yang tidak melakukan permintaan atau perintah. Kekuasaan ini juga bisa dibidang kekuasaan karena rasa takut oleh seseorang yang memiliki kuasa dalam suatu hal. Karena hal itulah orang-orang yang menjadi bawahan atau pengikutnya, menjadi tunduk dan mau untuk melakukan perintah yang diberikan oleh orang yang berkuasa itu. Karena jika mereka tidak

mengikuti apa yang diperintahkan, maka bawahan/pengikutnya tersebut akan mendapatkan sebuah hukuman.

2. *Insentif Power (reward power)*, adalah suatu sikap yang patuh atau tunduk yang dicapai berdasarkan kepatuhan/kemampuan untuk memberikan *reward* (imbalan) agar dipandang orang lain berharga, seseorang akan patuh terhadap orang lain, jika dijanjikan akan diberikan sebuah imbalan yang sesuai dengan prestasinya
3. *Legitimate Power* (kuasa yang sah), *legitimate power* adalah pemimpin memperoleh hak dari pemegang kekuatan untuk memerlukan dan menuntut ketaatan. Seseorang yang telah memiliki *legitimate power*, akan menuntut bawahan atau pengikutnya untuk selalu taat pada peraturannya. Karena *legitimate power* memiliki definisi lain, yaitu kekuatan yang bersumber dari otoritas yang dapat dipertimbangkan hak untuk memerlukan dan pemenuhan perintah.
4. *Expert power* (kekuasaan pakar), adalah Pengaruh yang berdasarkan pada kepercayaan target bahwa pemegang kekuatan memiliki keahlian dan kemampuan yang superior dalam bidangnya. Seseorang yang memang ahli dalam bidangnya, akan mudah untuk menguasai/ mempengaruhi orang lain. Para anggota dalam suatu kelompok, pasti memiliki skill dan kemampuan yang berbeda. Maka dari itulah, suatu kelompok tercipta untuk saling melengkapi kekurangan anggota kelompok lainnya.
5. *Referent Power* (kekuasaan rujukan), pengaruh yang didasarkan pada pemilikan sumber daya atau ciri pribadi yang diinginkan oleh seseorang, berkembang dari rasa kagum terhadap orang lain, untuk menjadi seperti orang

yang dikaguminya itu, dikarenakan adanya karisma. Selain itu, *referent power* juga menjelaskan bagaimana *charismatic leader* (seberapa tinggi komitmen anggota tersebut pada kelompoknya) mengatur untuk menggunakan banyak kontrol dalam kelompok mereka.

Teori kekuasaan diperlukan sebagai salah satu teori dalam penelitian ini untuk menganalisa peran Muawiyah bin Abu Sofyan sebagai penguasa pada masa kekhalifaan Bani Umayyah, terutama perannya dalam kemajuan bidang politik, ekonomi, social dan budaya.

2. Peranan

Di dalam penelitian ini penulis meminjam teori dari Ilmu Sosiologi mengenai peranan. Teori ini digunakan sebagai alat untuk menganalisa peranan seorang pemimpin, dalam hal ini Muawiyah, di dalam lingkungan masyarakat Islam serta pemerintahan. Dalam ilmu sosiologi dijelaskan bahwa peranan merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau dari struktur yang menduduki suatu posisi dalam sistem. Peranan dari struktur tunggal maupun bersusun, ditentukan oleh harapan orang lain atau perilaku peran itu sendiri, juga ditentukan oleh pemegang peran terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peran tadi. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2001: 258).

Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah sebagian besar akibat dari tuntutan dan harapan terhadap peran yang

dipegang oleh aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu pula. Harapan atau dugaan itulah yang membentuk peranan.

Peranan lebih menunjuk pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Peranan mencakup tiga hal(Soekanto,2001:269), yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat sebagai organisasi.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat.

Teori peran setidaknya mencakup tiga hal, meliputi peran struktural, fungsional, dan relasional(Soekanto,2001:269).

1. Peran struktural, peran struktural berkaitan dengan institusi, lembaga, atau organ. Menurut Spencer, masyarakat manusia adalah suatu organisme. Hal yang terpenting adalah pengertian dari sistem, yang diartikan sebagai suatu himpunan atau kesatuan dari unsur-unsur yang saling berhubungan selama jangka waktu tertentu dan atas dasar pola tertentu. Lembaga-lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam masyarakat tanpa memperdulikan apakah masyarakat tersebut mempunyai taraf kebudayaan sederhana atau modern. Lembaga kemasyarakatan merupakan suatu jaringan daripada proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk

memelihara hubungan-hubungan serta pola-polanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya.

2. Peran fungsional, suatu struktur kelembagaan dalam masyarakat pada dasarnya memiliki fungsi-fungsi. Lembaga sosial sebagai unsur struktur dianggap dapat memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup dan pemeliharaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Memiliki beberapa fungsi, di antaranya :
 - a. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat tentang bagaimana berperilaku.
 - b. Menjaga keutuhan masyarakat
 - c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial.
3. Peran relasional, hubungan antara suatu individu masyarakat dengan relasi-relasi sosial lainnya, menentukan struktur dari masyarakatnya di mana hubungan antar manusia dengan relasi tersebut berdasarkan atas suatu komunikasi yang dapat terjadi di antara keduanya. Relasi-relasi sosial, suatu individu dengan sekumpulan masyarakat menciptakan segi dinamika dari sisi perubahan dan perkembangan masyarakat. Sebelum terbentuk sebagai suatu bentuk konkrit, komunikasi atau hubungan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial di dalam suatu masyarakat telah mengalami suatu proses terlebih dahulu di mana proses-proses ini merupakan suatu bentuk dari proses sosial itu sendiri

3. Peradaban

Peradaban menurut istilah umum adalah hasil dari kebudayaan yang mengacu kepada cara berpikir, cara pandang dari manusia yang kemudian termampakan dan dimanifestasikan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan teknologi yang tujuannya untuk memudahkan dan mensejahterakan hidup masyarakatnya.

Menurut Spengler, peradaban tidak lain adalah sebagai sesuatu kebudayaan yang telah mengalami beberapa proses⁵ diibaratkan sebanyak empat musim. Terbentuknya sebuah peradaban tidak serta merta terjadi begitu saja. Beberapa teori mengatakan peradaban yang terbentuk dalam sejarah umat manusia terlebih dahulu akan melalui proses yang pelik dan tidak jarang menuai konflik (Raharjo,2002:24).

Dalam konteks peradaban, Islam selalu menampilkan peradaban baru dengan sistem kehidupan masyarakatnya melalui corak pemerintahannya yang tentunya berbeda essensinya dengan peradaban sebelumnya. Peradaban yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW, misalnya, jelas sangat berbeda dengan peradaban Arab di jaman jahiliyah. Begitu juga dengan kelahiran peradaban-peradaban yang terimplementasi melalui sistem pemerintahan pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dan dinasti-dinasti Islam lainnya yang timbul dan berpengaruh terhadap kekayaan khazanah peradaban Islam.(Samsul Munir,2009:5).

⁵Spengler menganalogikan terbentuknya peradaban melalui 4 siklus, yang dimulai dari musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Periode pertama adalah masa mengatasi atau menetapkan. Periode kedua adalah masa remaja atau masa berkembang yang dianggap sebagai waktu untuk mematangkan diri. Di belahan dunia barat, masa ini terjadi pada saat *renaissance*. Periode ketiga adalah masa dewasa, yang dalam kebudayaan ditandai dengan berdirinya kota besar. Dan periode keempat yang dinyatakan sebagai masa kehancuran atau kematian

Periode lahirnya dinasti-dinasti tersebut tentu tidak bisa bersamaan, kelahiran dinasti baru biasanya ditandai akibat adanya sebuah perubahan atau revolusi. Revolusi yang terjadi disebabkan oleh banyak hal bisa jadi akibat kemunculan kebudayaan baru, berupa pemikiran, penemuan, yang berpotensi memunculkan sebuah keinginan dan mendorong masyarakat untuk menciptakan sebuah perubahan yang lebih baik lagi dari kondisi yang telah dibuat oleh dinasti sebelumnya. Karena itu, tidak bisa dipungkiri kemudian munculnya dinasti baru akan menandakan lahirnya sebuah peradaban baru dan keruntuhan peradaban lama.

Proses kemunculan dan runtuhnya sebuah peradaban secara metodeologi dijelaskan melalui pemikiran Ibnu Khaldun⁶ dalam karyanya, *Mukadimah*. Dia menyatakan bahwa untuk mengenal peradaban maka terdapat lingkaran perubahan tingkatan sosial atau solidaritas kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Perubahannya melalui tiga tahap. Tahap *pertama*, ada solidaritas sangat kuat yang ditimbulkan oleh kekerasan kondisi kehidupan nomaden. *Kedua*, munculnya kultur kehidupan menetap di lokasi tertentu dan meningkatnya kemakmuran yang memperburuk ikatan kelompok dan memperlemah solidaritas. *Ketiga*, hancurnya ikatan sosial, membubarkan kelompok, lalu diikuti oleh kristalisasi kelompok berdasarkan ikatan sosial baru. Ibnu Khaldun melihat, ketika titik dimana masyarakat menghadapi suatu permasalahan besar, maka mereka berusaha membuat kemakmuran sebagai puncak peradaban. Akan tetapi, karena terlena

⁶Ibnu Khaldun, lahir di Tunisia tanggal 27 Mei 1332 M. Ibnu Khaldun adalah pelopor dan sejarawan muslim terbesar yang mempelopori lahirnya Ilmu-Ilmu sosial. Salah satu karyanya yang masih dipakai dan banyak diadopsi oleh sarjana-sarjana barat dan menjadi rujukan bagi seluruh sejarawan dunia dalam mendalami dan mempelajari Ilmu sosial adalah lewat buku yang berjudul "*Mukadimah*" yang menceritakan tentang kronologis teori perkembangan sejarah sebuah peradaban

oleh kemakmuran tersebut maka solidaritas hancur, dan disitulah peradaban tersebut akan pula hancur dan kehancuran peradaban lama akan melahirkan peradaban yang baru (Atiqul Haque, 1995:89).

Pada sisi lain, Ibnu Khaldun juga menjelaskan hancurnya sebuah peradaban turut juga mempengaruhi cikal bakal terbentuknya sebuah pemerintahan. Menurut Ibnu Khaldun ada tiga jenis sistem pemerintahan, yaitu :

1. Pemerintahan *Al-mulk* (kerajaan) yang natural. Definisinya adalah bahwa setiap manusia mempunyai tujuan dan hawa nafsu dengan insting alamiah yang ada dalam diri masing-masing individu seperti sikap egoisme, arogan dan despotis, sehingga menimbulkan keserakahan untuk berperang satu dengan yang lainnya dalam memperebutkan kekuasaan, yang terlihat dalam jenis pemerintahan seperti ini adalah sistem pemerintahan yang sekarang kita sebut dengan otoriter, individualis, otokrasi, atau inkonstitusional yang akan merujuk pada kondisi *chaos*, perpecahan, instabilitas, dan kehancuran negara.
2. Pemerintahan *mulk* politik. Definisinya bahwa pemerintahan ditujukan demi keutamaan rakyat yang harus sesuai dengan rasio dalam mencapai kemashalatan duniawi guna mencegah mudharat, jenis pemerintahan ini disatu dipuji disatu sisi, dan dicela disisi lain, sistem pemerintahan ini biasa diidentifikasi dengan sebagai sistem pemerintahan republik, yang hakikat pemerintahannya merupakan tuntutan dari sekumpulan manusia yang bersifat aksiomatis dan materialis yang terkadang kebijakan-kebijakannya berdasarkan rasio dari para pemikir dan intelektual umat melenceng dari nilai-nilai kebenaran dan menindas orang-orang yang berada dibawah kekuasaannya, karena sistem pemerintahan ini hanya membatasi diri dalam

urusan keduniaan dan mengesampingkan kehidupan spiritual dan aspek-aspek keagamaan, hingga tidak mampu mewujudkan kepentingan rakyatnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat.

3. Pemerintahan perwakilan dari Tuhan sebagai pemilik syariat dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengan ajaran-ajarannya. Inilah yang dia sebut sebagai kekhalifahan atau keimamahan; ataupun seperti yang jelas terpahami dari definisinya yang disebut sebagai pemerintahan yang islami yang aturan-aturannya berasal dari Allah Swt.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu studi yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap data-data pustaka yang relevan. Data kepustakaan sangat diperlukan dalam penelitian ini sebagai literatur yang mendukung baik sebagai sumber primer dan sekunder.

Metodologi dalam penelitian ini juga menggunakan metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis secara sistematis dan objektif. Metode penelitian sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan pemersalahannya. Dengan kata lain, metode penelitian sejarah adalah instrumen untuk merekonstruksi peristiwa sejarah (*history past actuality*) menjadi sejarah sebagai kisah (*history as written*). Dalam ruang lingkup ilmu sejarah, metode penelitian itu disebut metode sejarah (Kartodirjo, 1993 : 35)

Dalam proses penulisan sejarah sebagai kisah, pertanyaan-pertanyaan dasar itu dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang perlu diungkap dan dibahas. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus menjadi sasaran penelitian sejarah, karena penulisan sejarah dituntut untuk menghasilkan eksplanasi (kejelasan) mengenai signifikansi (arti penting) dan makna peristiwa.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang kemudian akan dihimpun terkait dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang “ Peranan Muawiyah bin Abu Sufyan dalam Perkembangan Peradaban Islam”. Selanjutnya data akan dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode sejarah , yang mencakup lima tahapan kerja.

Tahap *pertama*, yakni pemilihan topik. Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus terlebih dahulu menentukan topik yang akan diteliti. Pemilihan topik hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Unik, artinya topik yang dipilih mengandung rasa ingin tahu dan ketertarikan pembaca.
- Bernilai, artinya permasalahan yang diteliti memiliki arti penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Kesatuan, artinya unsur yang dijadikan bahan penelitian mempunyai satu kesatuan ide.
- Orisinal, artinya topik yang dipilih merupakan pembuktian baru atas peristiwa masa lalu.

- Praktis, artinya data yang di butuhkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peneliti.

Selain itu, dalam proses pemilihan topik peneliti harus memperhatikan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual terhadap topik yang dipilih.

Kedekatan emosional berarti peneliti suka terhadap topik yang dipilihnya. Sedangkan kedekatan intelektual berarti peneliti menguasai topik yang dipilihnya.

Tahap *kedua*, yakni heuristik. Heuristik ialah tahapan dimana peneliti melakukan pencarian untuk menemukan dan menghimpun sumber-sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data mengenai subjek yang terkait secara langsung (Kuntowijoyo, 1995: 95). Dalam hal ini penulis akan melakukan proses heuristik dengan mencari sumber melalui studi kepustakaan dan wawancara (sejarah lisan). Dikarenakan objek utama penelitian adalah majalah dengan kata lain adalah sumber tertulis sehingga mungkin erat kaitannya dengan literatur-literatur lainnya maka penulis akan pengoptimalkan studi kepustakaan di beberapa tempat yang diperkirakan menyimpan sumber-sumber yang dibutuhkan penulis(Kuntowijoyo, 1995: 95).

Tahap *ketiga*, yakni kritik sumber. Dalam tahapan ini, sumber-sumber yang telah terkumpul kemudian diuji tingkat kredibilitasnya agar didapatkan data-data yang otentik dan akurat. Kritik dilakukan secara ekstern dan intern. Kritik ekstern bertujuan untuk menguji keotentikan suatu sumber termasuk menyelidiki bentuk sumber, usianya, waktu, dan tempat dibuatnya, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian mengenai asli tidaknya sumber yang terkumpul. Kritik intern dilakukan untuk menguji dengan kritis dan akurat dari isi sumber yang didapat, apakah sumber tersebut mempunyai kredibilitas atau tidak untuk

digunakan sebagai sumber penulisan. Kritik intern berusaha membuktikan apakah data yang terkandung dalam sumber itu dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

Tahap *keempat*, yakni interpretasi, dalam tahapan ini disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber. Dalam tahapan ini data-data yang telah melalui tahapan kritik kemudian ditafsirkan untuk mendapatkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi interpretasi untuk mendapatkan makna dan saling berhubungan antara fakta yang satu dengan yang lainnya. Di dalam proses interpretasi sejarah, seorang peneliti harus berusaha mencapai pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Pada tahapan ini dikumpulkan kembali lalu disusun dan dirangkaikan menjadi satu kesatuan tulisan berbentuk hasil penelitian tesis.

Tahap *kelima*, historiografi yang merupakan langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah. Historiografi adalah cara penulisan, pemaparan atau penulisan laporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Penulisan hasil laporan hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari fase awal sampai akhir (penarikan kesimpulan).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan empat tahapan yaitu: membaca, mencatat, menyeleksi data dan mengategorikan data. Secara rinci penelitian ini diawali dengan membaca dan mencatat bahan-bahan tersebut untuk memperluas informasi yang diperlukan. Tahap selanjutnya,

diadakan penyeleksian data yang telah diperoleh. Tahap terakhir adalah pengkategorian data untuk dimasukkan pada sub-sub pembahasan yang tepat.

4. Teknik Analisa data.

Sesuai dengan metode penelitian, dalam menganalisa data, data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang kemudian dielaborasi dengan menganalisis berdasarkan data-data yang didapat setelah data dikumpulkan dan dikategorikan. Data selanjutnya diolah secara sistematis. Olahan dimulai dari menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan data dan mengumpulkan data. Teknik analisis data terdiri dari tiga komponen (Maleong,2002:24).

1. Reduksi data, yakni data yang diperoleh dilokasi penelitian dituangkan dalam uraian-uraian laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proses penelitian berlangsung.
2. Sajian data, yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
3. Penarik kesimpulan, yakni melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses analisis data berlangsung.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang berisikan tentang pemaparan tentang permasalahan penelitian yang kemudian menjadi awal ketertarikan penelitian dari penulis, dengan menjelaskan berbagai pengetahuan awal yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

BAB II : PERADABAN ISLAM SEBELUM TERBENTUKNYA DINASTI UMAYYAH

Pada bab ini, akan menceritakan dan membahas tentang peradaban sebelum terbentuknya dinasti Bani Umayyah, khususnya pada peradaban sebelum Islam dan peradaban Islam pada masa Rasulullah serta Khalifaur Rasyidin, sebagai peradaban Islam.

BAB III : BIOGRAFI MUAWIYAH BIN ABU SUFYAN

Pada bab ini, berisikan profil Muawiyah bin Abu Sufyan secara utuh, yang mengulas kepribadian

Muawiyah bin Abu Sufyan hingga pengaruh-pengaruh yang membentuk proses kematangan intelektualberpikirnya yang menjadikan sebagai pribadi yang ambisius dan kontroversial.

**BAB IV : PERANAN MUAWIYAH BIN ABU SUFYAN
DALAM PERKEMBANGAN PERADABAN
ISLAM (661-680 M)**

Pada bab ini, berisikan tentang peranan dan kontribusi politik Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri dan khalifah pertama dinasti Bani Umayyah pasca pemerintahan Khulafaur Rasyidin, khususnya kontribusi pemikirannya terhadap perkembangan kemajuan peradaban Islam yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

BAB V : KESIMPULAN

Pada bab ini, secara tekhnis berisi kesimpulan yang berdasarkan dari hasil penelitian pustaka tentang Muawiyah bin Abu Sufyan, dari profil hingga peranan dan kontribusinya dalam khazanah

peradaban Islam, dengan memberikan beberapa hasil rekomendasi dan saran yang terkait dengan penelitian ini selanjutnya.

BAB II

PERADABAN ISLAM PADA MASA DINASTI BANI UMAYYAH

A. Peradaban Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Sebelum membahas tentang kemunculan peradaban Dinasti Umayyah, terlebih dahulu akan dibahas mengenai peradaban sebelumnya, terutama peradaban dan kehidupan sosial pada masa Rasulullah SAW. Alasan untuk mengemukakan terlebih dahulu peradaban pada masa Rasulullah tentu dikarenakan hal peradaban Islam tidak bisa dipisahkan dari peran Rasulullah SAW sebagai tokoh sentral yang membuat Islam menjadi peradaban yang maju pada masa itu. Bisa dikatakan peradaban pada masa Rasulullah adalah titik awal bagi tumbuhnya peradaban-peradaban besar Islam selanjutnya.

Sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, di dunia Arab sudah terdapat berbagai macam agama, yaitu Paganisme, Kristen, Yahudi, dan Majusi. Masyarakat Arab telah mengenal agama Tauhid semenjak kehadiran Nabi Ibrahim. Bekas-bekas agama Nabi Ibrahim, masih tersisa ketika Islam diperkenalkan pada masyarakat Arab. Bekas yang masih terasa adalah penyebutan Allah sebagai Tuhan mereka. Secara fisik peninggalan Ibrahim dan Ismail yang masih terpelihara adalah *Bait al-Allah* atau Ka'bah yang berada dipusat kota Mekkah (Karim, 2007 : 59).

Sejarah mencatat bahwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab masih menempatkan Allah sebagai Tuhannya walaupun dalam perkembangan berikutnya mengalami proses pembiasaan yang mengakibatkan

terjadinya pengingkaran prinsip *tauhid*. Pada umumnya mereka menjadikan berhala⁷ sebagai sesuatu yang sangat dekat dengan menyembahnya (Karim, 2007: 60).

Oleh banyak sejarawan, masa itu disebut dengan masa Jahiliyah, masa kegelapan, masa kebodohan dalam hal moral (agama), mereka beragama dengan mengagung-agungkan anggapan mereka sendiri, yang tercipta dari perilaku mereka sehari-sehari dan menyimpang dari ajaran Tuhan. Bahkan perilaku mereka cenderung barbar, diantaranya yang banyak dicatat oleh sejarah adalah kebiasaan Arab pra Islam membunuh anak perempuan dan melembagakan perbudakan dan sebagainya (Rahman, 1977: 7).

Dapat dikatakan, bahwa dari kebudayaan Arab, Islam memelihara, memperbaiki, mengembangkan serta menyempurnakan beberapa hal seperti moral, tata pergaulan, strategi perang Islam, dan hukum keluarga. Al-Qur'an dan sunnah memberikan perubahan yang nyata bagi bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang memeluk Islam tentang *way of life* menyangkut tujuan hidup, peribadatan, dan sebagainya yang menjadi tujuan utama bagi pemikiran dan peradaban Islam.

Pada tahun sebelum bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, lahir Muhammad sebagai pembawa Islam, ayahnya Abdullah wafat sebelum dia lahir, sedangkan ibunya Aminah menemui ajal saat usia Muhammad hanya enam tahun. ia yang tatkala dikenal sebagai seorang yang berbudi luhur, berkepribadian kuat, dan

⁷Penyembahan berhala pada mulanya terjadi ketika orang-orang Arab pergi ke luar kota Makkah. Mereka selalu membawa batu yang diambil disekitar Ka'bah, kemudian menyucikan batu tersebut dan menyembahnya dimanapun mereka berada. Lama-kelamaan dibuatlah patung dari batu tersebut dan disembah beramai-ramai dengan cara mengelilinginya (tawaf) sampai-sampai jumlah patung yang dibuat mencapai 360 buah.

sebagai *Al-Amin* (dapat dipercaya). Karena setiap amanah yang dipercayakan kepadanya dapat diselesaikan dengan baik. Saat usia 12 tahun, Muhammad SAW menjalankan dagangannya bersama pamannya Abu Thalib ke luar negeri Syam. Demikian juga saat usianya 25 tahun, perdagangan yang dibawa Muhammad SAW memberikan keuntungan yang amat besar kepada majikannya, Khadijah yang kemudian dinikahi oleh Muhammad pada saat Khadijah berumur 40 tahun (Karim, 2007: 63).

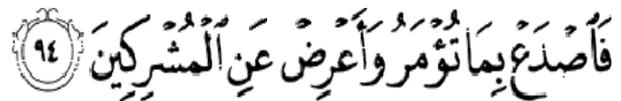
Melihat situasi masyarakatnya yang semakin jauh dari prinsip-prinsip kebenaran, Muhammad memutuskan untuk banyak melakukan kontemplasi. Renungan yang mendalam tentang apa yang terjadi pada masyarakatnya membuat dadanya sesak dan punggungnya terasa penuh beban. Penunjukkannya sebagai Nabi ditandai dengan turunya wahyu saat ia berusia 40 tahun. Wahyu pertama yang diterimanya adalah surat al-Alaq, ayat 1-5.

Kehidupan Nabi Muhammad dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekkah dan periode Madinah. Telah disebut ketika Nabi SAW muncul sebagai *rahmatallil'amin* ada dua kekuatan dunia, yaitu Romawi Timur (Konstantinopel), Eropa Selatan, Asia Kecil, Afrika Utara, Mesir dan Sasania (Asia Tengah dan Barat Daya) yang selalu berperang satu sama lain. Agama yang ada di kedua wilayah tersebut tidak mampu memberikan jalan keluar bagi terciptanya perdamaian.

Setelah dakwah berjalan tiga tahun secara diam-diam, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat (Al-Syu'ara:241) yang berbunyi "*berilah*

peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat”. Berdasarkan ayat tersebut Muhammad mengajak kaum dan keluarganya, yaitu Bani Hasyim untuk masuk Islam. Akan tetapi mereka tidak menghiraukannya, bahkan pamannya Abu Lahab mencemoohnya. (Karim, 2007 : 64)

Sesudah mengajak keluarganya, Muhammad kemudian mengajak orang sesukunya, yaitu suku Quraisy untuk mengesahkan Tuhan dan bahwa tiada sekutu bagi-Nya, sebagaimana termuat dalam (Al-Hijr : 94) yang berbunyi :



Artinya : *”Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang yang musyrik”*.

Setelah dakwah Nabi Muhammad dilakukan secara terang-terangan, kemudian kaum Quraisy merasa terancam dengan berkembangnya dakwah Islam. Mereka berusaha menghalang-halangi dakwah Islam itu dengan berbagai cara, di antaranya dengan memutuskan hubungan dengan kaum Muslimin hingga menyiksa kaum Muslimin, sehingga Rasulullah memutuskan dan memerintahkan kaum Muslim untuk pindah ke Habsyi. Hijrah yang pertama dalam sejarah Islam ditandai dengan berangkatnya sepuluh orang laki-laki dan empat orang perempuan ke negeri Habsyi.

Peristiwa ini terjadi pada tahun 615 M dan mengandung pengertian perpindahan dari *dar al harbi* ke *dar al amni*. Pemberangkatan pertama yang berhasil itu menyebabkan pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang lain

menyusul sehingga jumlahnya mencapai 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Mungkin karena peningkatan jumlah yang berhijrah ini, sehingga sebagian sejarawan muslim berpendapat bahwa hijrah ke Habsyi dilakukan sebanyak dua kali. (Haekal, 1990 : 91).

Perjalanan hijrah selanjutnya kemudian diteruskan ke Yastrib (Madinah) selain karena undangan resmi dari penduduk Yastrib yang datang sebanyak dua kali, serta keadaan penduduk Makkah yang sama sekali tidak berubah. Peristiwa hijrah ke Yastrib merupakan salah satu lembaran terpenting dalam peradaban Islam pada zaman Nabi, khususnya di Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW telah sampai di Madinah, Nabi membuat perjanjian diantara suku-suku yang ada disana dan menghasilkan konstitusi tertulis pertama dalam sejarah umat Islam yaitu Piagam Madinah (*The Charter of Madinah*). (Karim, 2007 : 67)

Berdasarkan pasal pertama konstitusi tersebut, Nabi Muhammad SAW membentuk *Ummah* yang disepakati oleh empat macam komunitas : Yahudi, Nasrani, Anshar, dan Muhajir, yakni negara persemakmuran. Konsep *Ummah* yang diperkenalkan Nabi Muhammad SAW, adalah bangunan komunitas masyarakat yang kompleks di Madinah yang dibangun berdasarkan pondasi keberagaman yang kuat sehingga melahirkan masyarakat sipil yang kokoh.

Dalam periode Makkah dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, adalah penanaman dasar-dasar keimanan, Hal ini berbeda saat dia berada di Madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad menerapkan syariah Islam dan pembangunan ekonomi sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan pindahnya ke Madinah, maka Nabi Muhammad SAW, berhasil meletakkan dasar-dasar kemasyarakatan Islam. (Muntoha, 2002 : 30-33)

Dasar berpolitik di negeri Madinah adalah prinsip keadilan yang harus dijalankan kepada setiap penduduk tanda pandang bulu. Dalam prinsip keadilan diakui adanya kesamaan derajat antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Yang membedakan diantara mereka hanyalah takwa kepada Allah. Yang lain adalah prinsip musyawarah untuk memecahkan segala persolan dengan dalil Al-Qur'an dan bermusyawarahnya diantara mereka dalam suatu urusan.

Pemerintahan yang dibentuk Nabi di Madinah, terdapat beberapa hal yang prinsipil dan pokok seperti termuat dalam Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal diantaranya sebagai berikut : Negara dan pemerintahan Madinah adalah bercorak teokrasi dan dikepalai oleh seorang Rasul yakni Muhammad SAW dan ia adalah pemimpin agama, dan kedaulatan ada di tangan Allah SWT. (Husaini, 1949 : 18-22)

Muhammad SAW sebagai pelaksana, namun tidak bisa mengabaikan kedaulatan rakyat dengan hadirnya majelis Syura, selain itu, Nabi juga memberikan kebebasan individu, kebebasan beragama, hak sebagai warga negara dan sosial, maka pemerintahan di Madinah bercorak republik, bahkan beberapa ahli politik Barat, seperti Bodin, Hobbes, menyatakan bahwa pemerintahan di Madinah merupakan *Islamic State*⁸.

⁸Sistem yang dibangun oleh Rasulullah Saw, dan kaum muslimin yang hidup bersama di Madinah, jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa sistem tersebut dapat dikategorikan dalam sistem *Par excellence*, dimana hakikat Islam bukanlah semata agama (a *religion*) namun juga merupakan sebuah sistem politik (a *political system*). seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun diatas fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, perpolitikan *intern* dalam negara Islam senantiasa berada dalam ketenangan, dan persatuan umat terwujud dengan baik. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kaum muslimin, mereka segera menyerahkan masalah mereka dengan hak dan adil dan mereka berkewajiban untuk menaati keputusan Rasulullah SAW.

B. Peradaban Pada Masa Al-Khulafa Al-Rasyidun

Ketika Rasulullah menjelang wafat, seketika umat Islam⁹ merasakan kekosongan kepemimpinan, sehingga dibutuhkan pengganti beliau guna meneruskan kepemimpinan Islam selanjutnya dengan meletakkan peraturan baru dalam pergantian kepemimpinan Islam selepas Rasulullah SAW wafat dengan menetapkan pengganti Rasulullah SAW guna memimpin negara yang kemudian disebut *Khulafaur Rasyidin*.

Khulafaur Rasyidin., adalah para pengganti Nabi Muhammad SAW yang dipilih oleh rakyat. Mereka menjalankan kewajiban kepala negara dan mempunyai hak penuh dalam urusan dunia, namun mereka juga harus tunduk kepada majelis syura karena tanpa persetujuan majelis syura, maka mereka tidak bisa mengeluarkan kebijakan apapun. Disinilah prinsip demokrasi telah mulai tertanam pada awal perkembangan Islam (Rahman, 1977 : 70).

Masa kekuasaan *khulafaur rasyidin* yang dimulai sejak zaman Abu Bakar Ash-Shiddiq hingga Ali bin Abi Thalib, merupakan masa kekuasaan khalifah Islam yang berhasil dalam mengembangkan wilayah Islam lebih luas. Nabi

⁹Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, umat Islam sepakat untuk mengadakan pertemuan di Safiqah yang dihadiri oleh Abu Bakar , Umar serta beberapa sahabat dari kalangan kaum Muhajirin guna membahas pergantian kepemimpinan selepas Nabi wafat, sehingga kemudian disepakati untuk mengangkat pengganti Nabi dengan institusi politik yang baru bernama ‘khalifah’ yang dipilih berdasarkan musyawarah yang disepakati seluruh umat Muslim.

Muhammad yang telah meletakkan dasar agama Islam di Arab, setelah beliau wafat, gagasan dan ide-idenya diteruskan oleh para khulafur rasyidin. Pengembangan agama Islam yang dilakukan *khulafaur rasyidin* dalam waktu yang relatif singkat telah membuahkan hasil yang gilang gemilang. Dari hanya wilayah Arabia, ekspansi kekuasaan Islam menembus ke luar Arabia memasuki wilayah-wilayah Afrika, Siria, Persia, bahkan menembus ke Bizantium dan Hindia¹⁰. (Samsul Munir, 2009 : 113)

Selain perluasan wilayah-wilayah kekuasaan Islam, Dr. Hasan Ibrahim dalam bukunya "*Tarikh Al-Islam As-Siyasi*" (Hasan Ibrahim, 1979 : 336), menjelaskan tentang berdirinya organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga negara yang ada pada masa *khalafaur rasyidin* yang bertujuan untuk mengatur kemashalatan umat, diantaranya yaitu lembaga-lembaga:

1. Lembaga Politik

Termasuk lembaga politik *khilafah* (jabatan kepala negara), *wizarah* (kementerian negara), dan *kitabah* (sekretaris negara).

2. Lembaga Tata Usaha Negara

Termasuk dalam urusan lembaga tata usaha negara , *Idaratul Aqalim* (Pengelolaan pemerintahan daerah), dan *diwan* (pengurusan departemen) seperti *diwan kharaj* (kantor urusan agama), *diwan rasail* (kantor urusan arsip), *diwanul barid* (kantor urusan pos), *diwan syurthah* (kantor urusan kepolisian) dan departemen lainnya.

¹⁰Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaan dalam waktu tidak lebih dari setengah abad merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman politik yang memadai.

4. Lembaga Kehakiman Negara

Termasuk dalam lembaga kehakiman negara, urusan-urusan mengenai *Qadhi* (pengadilan negeri), *Madhalim* (pengadilan banding), dan *Hisabah* (pengadilan perkara yang bersifat lurus dan terkadang juga perkara pidana yang memerlukan pengurusan segera).

1. Abu Bakar Shiddiq (632-634 M)

Periode Abu Bakar Shiddiq¹¹ adalah periode yang sangat singkat hanya dua tahun, kekuasaan yang dijalankan pada masa khalifah Abu Bakar, sebagaimana pada masa Rasulullah bersifat sentralistik, kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan. Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya untuk bermusyawarah. (Yatim, 2000 : 36)

Pada awal pemerintahannya, ia diuji dengan adanya ancaman yang datang dari umat Islam sendiri yang menentang kepemimpinannya. Di antaranya perbuatan makar tersebut ialah timbulnya orang-orang yang murtad, tidak mau mengeluarkan zakat, orang-orang yang mengaku Nabi dan pemberontakan dari beberapa kabilah-kabilah.

¹¹Abu Bakar Shiddiq, penakluk dan penjaga Semenanjung Arab, menjalani hidup dengan keserhanaan. Pada masa enam bulan pertama pemerintahannya yang singkat itu, ia melakukan perjalanan bolak-balik dari al-Sunh (tempat tinggalnya yang sederhana dengan istrinya, Habibah) ke kota Madinah dan tidak menerima gaji sedikit pun karena negara pada masa itu belum memiliki pemasukan apa pun. Semua urusan negara dilakukannya di Serambi Masjid Nabi. Kualitas pribadi dan keyakinannya yang kokoh terhadap Muhammad SAW, menjadikannya sebagai figur yang paling menarik pada masa awal Islam dan membuatnya kondang dengan sebutan *Al-Shiddiq* (yang terpercaya).

Masa singkat perjalanan Abu Bakar Shiddiq menjadi khalifah dihabiskan dalam menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk kepada pemerintahan Madinah. Mereka menganggap bahwa pemerintahan Nabi Muhammad sudah tidak bisa dipatuhi lagi karena Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Karena pembangkangan mereka membuat Abu Bakar berinisiatif melawan mereka dengan perang, yang kemudian dikenal dengan Perang *Riddah* (perang melawan kemurtadan) dengan jenderalanya Khalid Ibnu Al-Walid.

Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, barulah Abu Bakar mengirim kekuatan keluar Arabia. Khalid Ibnu Al-Walid dikirim ke Iraq dan dapat menguasai Al-Hirah ditahun 634 M. Sedangkan ke Syria dikirim ekspedisi dibawah empat jenderal yaitu Abu Ubaidah, Amr ibn 'Ash, Yazid Ibn Abi Sufyan, dan Syurahbil. Sebelumnya pasukan dipimpin oleh Usamah yang masih berusia 18 tahun. Untuk memperkuat tentara ini, Khalid Ibnu Al-Walid diperintahkan meninggalkan Irak, dan melalui gurun pasir yang jarang dijalani, ia sampai ke Syria.

a. Peradaban Pada Masa Abu Bakar Shiddiq (632-634 M)

1. Menghimpun Al-Qur'an

Bentuk peradaban yang paling besar dan luar biasa pada masa pemerintahan Abu Bakar Shiddiq adalah penghimpunan Alquran. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk menghimpun Alquran dari pelepah kurma, kulit binatang dan hapalan kaum muslimin. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk

menjaga kelestarian Al-Qur'an setelah syahidnya beberapa penghawal Al-Qur'an pada perang Yamamah. (Ahmad Al-Ushayr,2006:150)

2. Kebijakan Kenegaraan

2. 1. Bidang Eksekutif

Kebijakan Abu Bakar dalam pemerintahan dan kenegaraan, terlihat dari pendelegasian tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun daerah. Misalnya pemerintahan pusat menunjuk Ali Bin Abi Thalib, Ustman Bin Affan dan Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris dan Abu Ubaidah sebagai Bendahara. Untuk daerah-daerah kekuasaan Islam, dibentuklah provinsi-provinsi dan untuk setiap provinsi ditunjuk seseorang amir. (Suyuthi Pulungan, 1994 : 112-113)

2.2. Pertahanan Dan Keamanan

Dengan mengorganisasikan pasukan-pasukan yang ada untuk mempertahankan eksistensi dan pemerintahan dari serangan pasukan Persia dan Romawi. Abu Bakar mengirim pasukan yang disebar demi memelihara stabilitas di dalam maupun di luar negeri. Untuk menghadapi Persia, Abu Bakar mengirim tentara Islam di bawah pimpinan panglimadan Khalid bin Walid, Mussana Bin Harisah yang kemudian berhasil merebut beberapa daerah penting di Irak dari kekuasaan Persia. Adapun untuk menghadapi Romawi, Abu Bakar memilih empat panglima Islam terbaik untuk memimpin beribu-ribu pasukan di empat front, yaitu Amr Bin Al-Ash di front Palestina, Yazid bin Abi Sufyan di front Damaskus, Abu Ubaidah di front Hims, dan Syurahbil bin Hasanah di front Yordania. Empat pasukan ini kemudian dibantu oleh Khalid bin Walid di front Siria. Perjuangan pasukan-pasukan tersebut, dan ekspedisi-ekspedisi militer berikutnya untuk

membebaskan Jazirah Arab dari penguasaan bangsa Romawi dan bangsa Persia, baru tuntas pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.

2. 3. Yudikatif

Fungsi kehakiman dilaksanakan oleh Umar Bin Khattab selama masa pemerintahan Abu Bakar tidak ditemukan suatu permasalahan yang berarti untuk dipecahkan, hal ini karena kemampuan dan sifat dari Umar dan masyarakat pada waktu itu dikenal '*alim*'.

2. 4. Sosial Ekonomi

Sebuah lembaga mirip *Baitul Al-Mal* , di dalamnya dikelolah harta benda yang didapat dari zakat, infaq, sedekah, ghanimah, dan lain-lain. Penggunaan harta tersebut digunakan untuk gaji pegawai, negara dan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan aturan yang ada. Dirwayatkan bahwa Abu bakar sebagai khalifah tidak pernah mengambil atau menggunakan uang dari *Baitul Al-Mal*. Karena menurutnya ia tidak berhak mengambil sesuatu dari *Baitul Al-Mal* umat Islam. Oleh karena itu, selama menjadi khalifah, ia tetap berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dari segi lain, fakta historis tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Abu Bakar telah sukses membangun pranata sosial politik dan pertahanan keamanan pemerintahannya. Dengan kata lain, ia berhasil memobilisasi segala kekuatan yang ada untuk menciptakan pertahanan dan keamanan *negara Madinah*, menggalang persatuan umat Islam, mewujudkan keutuhan dan keberlangsungan negara Madinah dan Islam, menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang masih berserakan menjadi satu mushaf. Keberhasilan ini tentu karena adanya

kedisiplinan, kepercayaan, dan ketaatan yang tinggi dari rakyat terhadap integritas kepribadian dan kepemimpinannya. (Dedi Supriyadi, 2008 : 72)

Ketika Abu Bakar merasa kematiannya telah dekat dan sakitnya semakin parah, Abu Bakar kemudian menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sahabat senior yang mendukung pilihan Abu Bakar. Beberapa hari setelah itu, pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 H/634 Abu Bakar pun wafat.

2. Umar Bin Khattab (634-644 M)

Setelah Abu Bakar Shiddiq wafat pada tahun 13 H, maka Umar bin Khattab¹² dibaiat sebagai khalifah selanjutnya yang akan meneruskan kepemimpinan Islam. Umar bin Khattab adalah pemimpin terkemuka dan pahlawan yang berasal dari suku Quraisy (A. Latif Osman, 1951 : 46). Umar bin Khattab yang mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bi Nufail bin Abd Al-Uzza bin Ribaah bin Abdullilah bin Qart bin Razail bin 'adi bin Ka'ab bin Lu'ay adalah salah satu sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW.

Umar bin Khattab dilahirkan di Mekkah dari keturunan suku Quraisy yang terhormat dan terpandang, dan tiga belas tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW (Muhammad Al-Khudari, 1964 : 64). Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab termasuk pemimpin Quraisy yang ditakuti oleh orang-orang yang sudah

¹²Umar bin Khattab sepanjang hayatnya menjalani kehidupan yang sangat sederhana mirip dengan para kepala suku Badui. Pada kenyataannya dalam tradisi Islam, Umar bin Khattab adalah pemimpin Islam terbesar setelah Nabi Muhammad SAW yang menjadi idola karena keshalehannya, keadilan dan kesederhanaannya yang merupakan personifikasi nilai yang dimiliki oleh seorang Khalifah. Wataknya yang terpuji menjadi teladan bagi para penerusnya, diriwayatkan bahwa ia hanya memiliki satu helai baju dan satu jubah yang keduanya penuh tambalan, tidur diatas pelepah kurma dan tidak memiliki perhatian selain pada kemurnian keimanannya, penegakan keadilan dan keagungan serta kebaikan Islam dan bangsa Arab.

masuk Islam, dia juga adalah musuh dan penentang Nabi Muhammad SAW yang paling kejam dan ganas bahkan berkeinginan besar untuk membunuh Nabi Muhammad SAW serta pengikut-pengikutnya. Dia sering menyebar fitnah dan menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang tenung. (Ensiklopedia Islam Jilid I, 1993 : 1256)

Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, pada bulan Dzulhijjah enam tahun setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kepribadiannya bertolak belakang dengan keadaan sebelumnya. Dia berubah menjadi salah seorang yang gigih dan setia membela agama Islam, bahkan dia termasuk sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW.

Zaman pemerintahan pada masa khalifah Umar bin Khattab penuh dengan riwayat penaklukan (perluasan daerah kekuasaan) dan perkembangan pemerintahan negara Islam dengan menerapkan berbagai peraturan-peraturan hukum. Gelombang ekspansi penaklukan pertama terjadi di ibu kota Syiria, Damaskus yang jatuh pada tahun 634 M, dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah pada pertempuran Yarmuk seluruh daerah Syiria jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syiria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin Ash dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Waqqas yang sedang dikuasai oleh Persia. Pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Waqqas berhasil menerobos pintu gerbang kekuatan Persia(Harun Nasution, 1985 : 85).

Beberapa departemen mulai didirikan, sistem pembayaran gaji dan pajak tanah mulai diatur dan ditertibkan, pengadilan juga didirikan dalam rangka

memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, jawatan kepolisian juga dibentuk. Demikian pula dengan pekerjaan umum, menempa mata uang dan menetapkan tahun hijrah (Yatim, 1993 : 38).

a. Peradaban Pada Masa Umar Bin Khattab (634-644 M)

1. Administrasi Pemerintahan

1. 1. Membentuk Diwan

Membentuk *Diwan*, setelah pasukan Islam berhasil memperoleh harta rampasan yang melimpah dari Persia dan Romawi. *Diwan* ini bertugas untuk mencatat orang-orang yang berhak mendapat jatah dari *Baitul Al-Mal*, sebuah lembaga yang didirikan pada tahun 20 H, Umar kemudian membentuk semacam sekretaris negara (*Diwan Al-Insya*). (Busman Edyar, 2009 : 26)

Umar menata sruktur kekuasaan dan administrasi pemerintahan negara Madinah berdasarkan semangat demokrasi. Untuk menunjang kelancaran administrasi dan operasional tugas-tugas eksekutif, Umar melengkapi dengan beberapa jawatan, antara lain : (Dedi Supriyadi, 2008 : 82)

- a. Dewan Al-Kharraj (Jawatan Pajak)
- b. Dewan Al-Addats (Jawatan Kepolisian)
- c. Dewan Al-Nafiat (Jawatan Pekerjaan Umum)
- d. Dewan Al-Jund (Jawatan Militer)

e. Bai'at Al-Mal (Lembaga pembedaharaan Negara)

1. 2. Membagi Kekuasaan Islam Dalam Beberapa Wilayah

Karena perluasan daerah terjadi begitu cepat, Umar segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi delapan wilayah propinsi yaitu : Mekkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Setiap provinsi didirikan kantor gubernur. Umar juga membentuk kepala distrik yang disebut '*Amil*'. Pada masanya perekrutan setiap pejabat dan pegawai dan pejabat pemerintahan juga diutamakan pada penguasaan ilmu bukan karena meminta jabatan, sebelum diambil sumpah terlebih dahulu diaudit harta kekayaannya oleh tim yang telah dibentuk oleh Umar bin Khattab. (Husaini, 1949 : 40-41)

1. 3. Menertibkan Administrasi Militer

Tentara pada masa Umar bin Khattab dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kavaleri dan Infantri. Tentara digaji oleh negara melalui sistem *Diwan*, Umar juga mengangkat pejabat bawahan seperti *a'arif* untuk membantu tugas komandan militer. Dalam memperkuat pertahanan Umar membangun benteng pertahanan dan mengangkat komandan barisan. Tentara diberi gaji bulanan, sehingga terbinalah *regular army* yang tinggal di berbagai barak seperti Fustat, Damaskus, Ramalah, Adjanain, Kufah, Basrah, Tsana, Aden dan lain-lain

2. Membentuk Majelis Syura

Umar melakukan reformasi dalam pemerintahannya, selama memimpin dalam kurun waktu sepuluh tahun, ia termasuk pemimpin yang berhasil terutama

bagi kesejahteraan rakyat dan peraturan Islam yang semakin kokoh. Dalam pemerintahannya, ada *Majlis Syura*, bagi Umar tanpa musyawarah, maka pemerintahan tidak bisa jalan. Ia mengumpulkan sahabat-sahabat besar dari kaum Muhajirin, Anshar dan lainnya. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah (*Majlis Syura*) diharapkan sebagai upaya pemberantasan praktek korupsi dan nepotisme serta persamaan di depan hukum.

3. Kebijakan Menyangkut Lembaga Yudikatif

Umar merupakan penguasa pertama yang menyediakan gaji bagi para hakim dan membedakan antara kekuasaan yudikatif dan legislatif. Untuk lembaga pidana, Umar mengenalkan sistem pidana penjara pertama kali di dunia Arab, meskipun dalam sifat yang tidak melembagai, hukuman ini sudah ada sejak zaman Rasul. Di samping kebijakan tersebut, Umar disebut sebagai peletak dasar prinsip-prinsip peradilan dan penyusunan pedoman bagi para hakim. *Risalah al-Qada* adalah surat Umar yang ditunjukkan kepada Abu Musa al-Asyar'i yang berisi tentang prinsip dan pedoman para hakim di pengadilan. (Busman Edyar, 2009: 26-27)

Pada akhir pemerintahannya, Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu (orang Persia). Hal ini dilatarbelakangi akibat pemecatan Mughirah ibn Syu'ba sebagai gubernur Kufah, karena Mughirah melakukan pembocoran rahasia negara dan pengkhianatan. Menjelang wafatnya, Umar bin Khattab membentuk tim formatur untuk memilih calon khalifah pengganti dirinya yang terdiri dari enam sahabat, yaitu Abdurrahman ibn 'Auf, Thalha, Zubair, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Waqas. Setelah dilakukan *voting*, pemungutan suara

didalam tim tersebut, maka terpilihlah Usman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Dalam sejarah Islam, itulah panitia pemilihan khalifah pertama kali.(Karim, 2007 : 88)

3. Usman Bin Affan (644-656 M)

Khalifah ketiga pengganti Umar bin Khattab adalah Usman bin Affan, nama lengkapnya adalah Ustman bin Affan bin Ash bin Umayyah dari suku Quraisy lahir pada tahun 576 M. Ia memeluk Islam¹³, karena ajakan Abu Bakar, dan menjadi salah seorang sahabat Nabi. Ia adalah orang yang sangat kaya, tetapi berlaku sederhana dan sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam, selain itu Ustman juga mendapat julukan *dzun nurain*, yang artinya memiliki dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqqayah dan Umi Kalsum. (Samsul Munir, 2009: 104)

Roda pemerintahan Usman bin Affan pada dasarnya tidak berbeda dari khalifah pendahulunya. Setelah menduduki kursi khalifah tidak sedikit langkah-langkah yang diambil Usman sebagai realisasi kebijaksanaannya. Ketekunan dan kedermawanannya tidak diragukan orang. Dalam pidato pemb'a'iatnnya, ia tegaskan akan meneruskan kebiasaan yang dibuat oleh pendahulunya. Pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan khalifah, pemegang dan pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Pelaksanaan tugas eksekutif di pusat dibantu oleh sekretaris negara. Jabatan sebagai sekretaris negara dianggap sebagai jabatan yang sangat

¹³Sebelum masuk Islam, Ustman bin Affan adalah seorang pedagang yang kaya raya, sebagai seorang hartawan, setelah beliau masuk Islam, Ustman bin Affan menghabiskan hartanya demi penyebaran dan kehormatan agama Islam dan kaum muslim. Selain menyumbang biaya-biaya perang dengan angka yang sangat besar, juga pembangunan kembali Masjidil Al-Haram (Mekkah) dan Masjid Al-Nabawi (Madinah).Ustman bin Affan juga berperan aktif sebagai perantara dalam perjanjian Hudaibiyah sebagai utusan Nabi.

strategis, karena mempunyai wewenang untuk mempengaruhi keputusan khalifah, selain sekretaris negara, khalifah Ustman juga dibantu oleh pejabat pajak, pejabat kepolisian, pejabat keuangan dibantu oleh pejabat pajak, pejabat kepolisian, pejabat keuangan atau *Baitul Mal*, seperti pemerintahan Umar (Dedi Supriyadi, 2008: 91).

a. Peradaban Pada Masa Utsman Bin Affan (644-656 M)

1. Perluasan Imperium Islam Hingga Ke Afrika

Masa pemerintahan Ustman bin Affan sebagai khalifah, termasuk masa yang paling lama, apabila dibandingkan dengan khalifah lainnya, yaitu selama 12 tahun. Tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa pemerintahannya berjalan dengan sukses, para penulis sejarah membagi dua periode masa pemerintahan Ustman, yaitu enam tahun awal pertama pemerintahannya yang berjalan dengan baik, dan enam tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang buruk (Samsul Munir, 2009: 105).

Perluasan pemerintahan Islam pada masa Ustman, telah mencapai Asia dan Afrika, seperti daerah Herat, Kabul, Ghazni, dan Asia Tengah, juga Armenia, Tunisia Cyprus, Rhodes dan bagian yang tersisa dari Persia, dan berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan orang Persia (Syed Mahmunnasir, 2005 : 158).

2. Pembangunan Sarana Publik

Dalam bidang sosial budaya, Usman Bin Affan juga memberikan perhatian besar terhadap kelangsungan kehidupan publik, kegiatan pembangunan

di wilayah Islam tidak luput dari pantauannya khususnya meliputi pembangunan daerah-daerah pemukiman, jembatan, jalan, masjid hingga wisma tamu. Semua jalan yang menuju Madinah dilengkapi dengan khalifah dan fasilitas bagi para pendatang. Masjid Nabi di Madinah diperluas, tempat persediaan air dibangun di Madinah, di kota-kota padang pasir, dan di ladang-ladang peternakan unta dan kuda (Jamil Ahmad, 1984 : 147).

Pembangunan berbagai sarana umum ini menunjukkan bahwa Ustman sebagai khalifah sangat memperhatikan kemaslahatan publik sebagai bentuk dari manifestasi kebudayaan sebuah masyarakat.

3. Pembangunan Angkatan Laut

Kekhalifahan Ustman Bin Affan patut diingat terutama karena pembangunan angkatan laut Arabnya. Pada saat itu Syria yang merupakan daerah kekuasaannya dengan Muawiyah sebagai gubernurnya menghadapi serangan-serangan angkatan laut dari bangsa Romawi di daerah-daerah pesisir provinsinya. Untuk memukul mundur penyerbuan tersebut Muawiyah melalui persetujuan Usman bin Affan membangun angkatan laut dan berhasil memukul mundur pasukan Romawi, bahkan Muawiyah juga berhasil menguasai Pulau Siprus dan mengalahkan penguasa Romawi dengan kewajiban untuk membayar upeti terhadap kekhalifahan Ustman Bin Affan. (Syed Mahmunnasir, 2005 : 159)

4. Penyusunan Kitab Suci Al-Qur'an

Prestasi monumental khalifah Ustman Bin Affan adalah membukukan mushaf Al-Qur'an. Pembukuan ini didasarkan atas alasan dan pertimbangan untuk

mengakhiri perbedaan bacaan di kalangan umat Islam yang diketahui pada saat ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan (Dedi Supriyadi, 2008 : 92).

Selama kekhalifahannya didapati bahwa terdapat berbagai bacaan dan versi Kitab Suci Al-Qur'an di berbagai wilayah imperium Usman memutuskan untuk menghilangkan perbedaan dan menghimpun versi yang benar dari kitab Suci Al-Qur'an. Penghimpunan kitab suci ini dilaksanakan oleh suatu dewan yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit. Dewan ini menghimpun kitab suci yang autentik, dan salinan yang terdapat pada Hafshah, salah seorang istri Nabi, banyak memberikan pertolongan dalam penghimpunannya. Mereka membuat beberapa salinan dari kitab suci yang sudah disusun. Salinan – salinan ini dikirimkan ke berbagai wilayah imperium, dan sisanya dibakar sehingga keautentikan kitab suci Alqur'an dapat dipelihara. (Syed Mahmunnasir, 2005 : 159)

b. Pemberontakan Pada Masa Usman Bin Affan

Di akhir pemerintahannya, Usman Bin Affan pada tahun 35 H/ 655 M, Ustman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa terhadap kebijaksanaannya mengangkat keluarganya terhadap jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan di antaranya (Muawiyah berkuasa atas seluruh wilayah Syam, Sa'id Ibn Ash atas wilayah Basrah, Abdullah Ibn Sa'id bin Abi Sarh atas wilayah Mesir dan Abdullah bin Amir atas wilayah Khurasan) sementara dipusat, jabatan sekretaris negara dipegang oleh pamannya, Marwan Ibn Hakam. Usman laksana boneka dihadapan kerabatnya dan tidak tegas terhadap kesalahan bawahannya. Harta kekayaan negara, oleh kerabatnya dibagikan tanpa terkontrol oleh Ustman sendiri (Yatim, 2000: 28).

Dalam konteks tersebut Nurcholis Madjid berpandangan, bahwa, sekalipun Ustman banyak mempunyai kelebihan dan jasa dibidang lain, namun dalam kepemimpinannya dicatat sebagai orang yang lemah. Karena kelemahannya itu, Ustman agaknya tidak berdaya menghadapi desakan-desakan kelompok tertentu dari kalangan keluarganya (Bani Umayyah). Dan mulailah berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Ustman sebagai pihak yang bertindak kurang adil dan nepotisme (Busman Edyar, 2009 : 36).

Pemberontakan pada masa khalifah Ustman Bin Affan tidak hanya dipicu oleh kebijakan-kebijakan politik yang dibuat oleh Ustman, dengan mengangkat kerabat-kerabatnya dalam roda pemerintahan, tetapi juga ada beberapa hal yang signifikan mengundang protes dari masyarakat, di antaranya dalam penggunaan uang kas negara (*bait al-mal*) Ustman memberikan *Humus* (seper lima) kepada Marwan dari penghasilan Mesir dan memberikan harta yang besar kepada kerabatnya sebagai bentuk dari silaturahmi.

Akibat kebijakan Ustman tersebut menimbulkan kecaman dan protes dari masyarakat yang kecewa dan menginginkan penurunan Ustman dari jabatannya sebagai khalifah, awalnya kekecewaan yang diimplementasikan melalui protes dalam bentuk aksi masih bisa ditolerir, namun lambat laun protes dan kekecewaan berkembang dalam taraf yang lebih luas lagi dengan munculnya gerakan kelompok-kelompok yang menyusun kekuatan untuk memberontak yang jumlahnya tidak lebih dari 2000 orang yang berasal dari Mesir, Kufah, dan Basrah yang secara bersamaan bergerak menuju Madinah. Para pemberontak ini kemudian mengobarkan api kekacauan selama 40 hari dan kemudian mengepung

rumah Ustman Bin Affan hingga membunuhnya dan merampok rumahnya. (

Busman Edyar, 2009 : 38-39)

4. Ali Bin Abi Thalib (656-661 M)

Pengukuhan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah bisa dikatakan tidak semulus pengukuhan tiga orang khalifah sebelumnya. Ali dibai'at ditengah-tengah suasana berkabung atas meninggalnya Usman Bin Affan, pertentangan dan kekacauan, serta kebingungan umat Islam Madinah, sebab kaum pemberontak yang membunuh Ustman mendaulat Ali supaya bersedia di bai'at menjadi khalifah. Setelah Ustman terbunuh, kaum pemberontak mendatangi para sahabat senior satu persatu yang ada di kota Madinah, seperti Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Saad bin Abi Waqqash dan Abdullah bin Umar agar bersedia menjadi khalifah, namun mereka menolak. Akan tetapi baik kaum pemberontak maupun kaum Anshar dan Muhajirin lebih menginginkan Ali menjadi khalifah. Ia didatangi beberapa kali oleh kelompok-kelompok tersebut agar bersedia dibaiat menjadi khalifah.¹⁴

Selain dibaiat oleh kelompok pemberontak penentang Ustman, Ali Bin Abi Thalib juga dibaiat oleh masyarakat Hijaz dan Irak, tetapi masyarakat Syam dibawah pimpinan Muawiyah Bin Abu Sufyan menolak untuk membai'at Ali.

¹⁴Berkaitan dengan kekhalfahan Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya pembai'atan terhadap dirinya berlangsung dalam situasi yang penuh gonjang-ganjing politik, walaupun harus digaris bawahi bahwa beliau adalah sahabat terbaik yang masih hidup pada masa itu dan yang paling berhak memegang kekhalfahan, sayangnya kondisi tidak mendukung.

Latar belakang penolakan Muawiyah terhadap kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, didasarkan bahwa Ali harus melaksanakan Qishas terlebih dahulu terhadap para pembunuh (pemberontak) Usman bin Affan dan memprotes keikutsertaan kaum pemberontak terhadap proses pembai'atan Ali sebagai khalifah.

a. Peradaban Pada Masa Ali Bin Abi Thalib (656-661 M)

Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai seorang pemimpin yang dikenal dengan sifat-sifat mulianya. Seorang pemimpin yang visioner, memiliki pandangan jauh ke depan, mampu menegakkan hukum dengan adil. Terutama keadilan dan keberaniannya dalam mencabut undang-undang yang diskriminatif, karena sifatnya yang tegas dan adil, menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang ditentang banyak pihak, terutama oleh Muawiyah bin Abu Sufyan.

Selama pemerintahannya ia menghadapi berbagai pergolakan, tidak ada masa sedikit pun dalam masa pemerintahannya yang dikatakan stabil. Setelah memangku jabatan khalifah, Ali mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Usman bin Affan. Sikap Ali paling ketat ialah terhadap pejabat yang korup, yang berkhianat memakan harta umat, yang sebelumnya ini pernah terjadi dan ia juga pernah mengingatkan Usman akan hal itu. Selain itu Ali juga memecat para pejabat yang diangkat pada masa ke Khalifahan Usman. Mereka ini adalah para pejabat yang memiliki sejarah kelam. Ali memecat mereka, kemudian mengembalikan harta kekayaan yang mereka miliki secara tidak sah ke baitulmal, dan menata ulang pembagian kekayaan untuk kepentingan umat dengan seadil-adilnya, masing-masing sesuai dengan amal dan perjuangannya. (Ali Audah, 2008:197)

Menurut Imam Al-Thabari, pembai'atan terhadap Ali diterima oleh semua pihak baik dari pihak Muhajirin maupun Anshar. Menurutnya, sahabat yang menolak Ali menjadi khalifah hanya ingin menuntut pembunuh Usman diseret dulu ke pengadilan, baru setelah itu mereka kan membai'at Ali. Mereka itu antara lain adalah Aisyah, Thalhah, dan Zubair. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan terang-terangan menolak membai'at Ali yang diikuti juga oleh pejabat yang diangkat pada masa Usman kemudian diberhentikan oleh Ali (Busman Edyar, 2009 : 43).

Dapat dikatakan pembai'atan Ali bukanlah sepenuh hati seluruh kaum muslimin bahkan mendapat banyak pertentangan, terutama yang berasal dari keluarga Umayyah. Merekalah yang selalu memanas-manasi kaum muslimin agar menentang pembai'atan dan mengobarkan perlawanan terhadap Ali.

b. Pertentangan Dan Peperangan Antar Sahabat

Terbunuhnya Usman dan pembaiatan Ali menjadi khalifah mengakibatkan kaum muslimin terpecah menjadi dua golongan besar, yaitu :

1. Golongan Usman, di bawah pimpinan Muawiyah Bin Abu Sufyan yang mendengung-dengungkan semboyan menuntut darah Ustman. Dua sahabat terkenal (Zubair dan Thalhah) dan istri Nabi, Aisyah berpihak pada golongan ini.
2. Golongan Ali yang menjadi tulang punggung Bani Hasyim. Golongan Usman yang terdiri dari Muawiyah dengan Thalhah, Zubair, dan Aisyah tidak berada dalam satu pihak. Masing-masing mempunyai kepentingan

yang berbeda, kelompok Muawiyah menginginkan jabatan khalifah berada ditangan Muawiyah, sementara kelompok Thalhah, Zubair dan Aisyah

Kebijaksanaan yang mula-mula dilakukan Ali, tatkala ia menjabat khalifah adalah memecat para gubernur dan para pejabat zalim dan tidak adil yang diangkat oleh Usman dan mengadakan penyelidikan atas kekayaan yang diambil oleh beberapa orang secara tidak sah dari *bait al-mal*. Bagi Ali pemecatan para gubernur yang zalim lebih diutamakan daripada pengusutan pembunuhan terhadap Usman, karena pengusutan pembunuhan terhadap Usman dapat dilakukan setelah negara dalam keadaan stabil. Namun, beberapa orang sahabat berpendapat lain, yaitu sebaliknya Ali menunda pemecatan terhadap para pejabat tersebut, namun usulan sahabat ini ditolak oleh Ali. Kenyataannya penundaan inilah yang dijadikan oleh Thalhah, Zubair dan Aisyah serta Muawiyah untuk menentang Ali. (Busman Edyar, 2009 : 44)

Dari kebijakan Ali tersebut, akhirnya menyebabkan pertentangan dan perlawanan yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk pemberontakan yang memicu banyak peperangan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, di antaranya perang Jamal dan Perang Shiffin yang kemudian berujung kepada peristiwa *tahkim (arbitrase)*.

1. Perang Jamal

Perang jamal atau perang unta adalah perang antara Khalifah Ali melawan Aisyah. Perang Jamal ini terjadi pada tanggal 11 Jumadil Akhir, 36 H atau Desember 657 M yang waktunya tidak sampai sehari. Perang ini berasal dari

perbedaan pendapat antara khalifah Ali, Muawiyah, Thalhah, Zubair, dan Aisyah dalam penyelesaian kasus pembunuhan terhadap Khalifah Usman bin Affan.

Sebagian sahabat berpendapat pembunuhan Usman harus dituntaskan segera, sedangkan Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa pembunuh Khalifah Usman berasal dari berbagai suku dan kabilah, bahkan menurut satu riwayat jumlahnya mencapai sepuluh ribu orang yang berasal dari Kuffah, Basrah, Mesir dan daerah lainnya. Dan mereka telah berbaur dengan kaum muslimin lainnya, maka yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah membentuk pemerintah yang kuat setelah itu baru beliau akan menyelesaikan kasus pembunuhan Khalifah Usman bin Affan(Hamka, 1981: 65).

Pilihan Ali bin Abi Thalib untuk lebih memprioritaskan pemerintahan terlebih dahulu agar berada dalam kondisi yang stabil beserta alasannya agar pengusutan Usman bin Affan dilakukan setelahnya, menyebabkan Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjabat sebagai gubernur Syam menolak untuk membai'atnya dan tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Usman bin Affan. Ali yang sebelumnya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Muawiyah untuk mengakui legalitas kepemimpinannya, dibalas Muawiyah dengan secarik surat kosong yang merupakan penghinaan bagi Ali bin Abi Thalib dan dianggap Ali sebagai tantangan perang, sehingga Ali memerintahkan untuk menyerang Muawiyah yang dianggap halal darahnya dengan bersiap menuju Syam bersama pasukannya.

Sementara itu dipihak lain, Thalhah, Zubair, dan Aisyah bermaksud pula menyerang Ali. Mereka berangkat dari Basrah mengatur tentara untuk menyerang

Ali dengan alasan yang sama seperti dalih yang diucapkan oleh Muawiyah. Rencana Thalhah, Zubair dan Aisyah tersebut dapat diketahui Ali melalui Amir Basrah, yaitu Ustman bin Hanaif. Akhirnya niat Ali bin Abi Thalib yang tadinya ingin menyerang Muawiyah Bin Abu Sufyan ke Syam, seketika dibatalkan dan berbelot menuju Basrah untuk menumpas pemberontakan dari Thalhah, Zubair dan Aisyah (Hamka, 1981: 447).

Langkah pertama Ali bin Abi Thalib dalam menumpas pemberontakan di Basrah, yaitu dengan mengirimkan beberapa utusan kepada Aisyah dan orang-orang yang bersamanya untuk melakukan perundingan agar mengurungkan niat mereka dan menerangkan dampak negatif dari apa yang mereka lakukan. Perundingan hampir selesai, dan pihak Aisyah puas dengan apa yang dikatakan oleh Ali dan mereka bersedia untuk membai'at Ali bin Abi Thalib, akan tetapi tiba-tiba perundingan kemudian dikacaukan oleh kelompok *Saba'iyah*¹⁵. Maka peperangan pun tidak dapat dielakkan. Dalam peristiwa perang Jamal, Thalhah dan Zubair pun gugur dalam medan perang, sedangkan Aisyah dikembalikan ke Madinah (Jordac, 1997 : 352).

Dari keterangan-keterangan di atas, tampak bahwa Ali bin Abi Thalib sebenarnya tidak menginginkan terjadinya peperangan melawan Aisyah, Thalhah dan Zubair, karena sasaran utamanya adalah Syam, bukan Basrah. Betapapun Ali menghindari pertempuran melawan Aisyah, tapi peperangan tidak bisa dihentikan akibat hasutan dari pihak ketiga, yaitu kelompok *Saba'iyah* (Hamka, 1981: 448).

2. Perang Shiffin

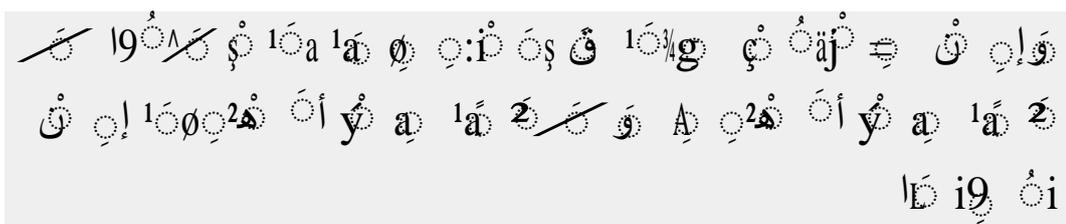
¹⁵Golongan *Saba'yah* adalah pengikut dari Abdullah bin Saba yang berada dalam pasukan Ali Bin Abi Thalib yang terang-terangan menolak kesepakatan damai antara kelompok Ali dan Aisyah dengan menyerang Aisyah terlebih dahulu tanpa sepengetahuan Ali Bin Abi Thalib. Akibatnya perang tidak dapat terelakkan.

Pasca perang Jamal, Ali kemudian mengutus Jari bin Abdullah Al-Bajali kepada Muawiyah agar membaiat Ali, tetapi Muawiyah menolak dengan alasan menuntut kematian Ustman Bin Affan. Bahkan Muawiyah mengancam Ali bin Abi Thalib dengan peperangan. Akhirnya terjadilah peperangan antara Muawiyah Bin Abu Sufyan dengan Ali Bin Abi Thalib di Shiffin. Tetapi tipu muslihat dari pasukan Muawiyah Bin Abu Sufyan yang dipimpin oleh Amr bin Ash yang sedianya sudah terdesak kalah, kemudian mengangkat mushaf Al-Qur'an di atas pedang sebagai syarat damai.

Ali bin Abi Thalib berkeyakinan bahwa hal itu hanya tipu muslihat dari pasukan Muawiyah saja, akan tetapi pasukan Ali menolak untuk meneruskan peperangan karena bagi mereka pasukan Muawiyah sudah mengangkat mushaf sebagai simbol perdamaian. Melihat suara pasukannya pecah akhirnya Ali bin Abi Thalib terpaksa menghentikan peperangan. (Ash-Shallabi, 2012 : 225)

3. Tahkim (*Arbitrase*)

Untuk menyelesaikan persengketaan antara pihak Muawiyah bin Abu Sufyan dengan pihak Ali bin Abi Thalib, maka disepakati oleh melakukan *Tahkim*. Dari pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asyari dan dari kelompok Muawiyah diwakili oleh Amr bin Ash (Harun Nasution, 1986: 32). Adapun dasar Tahkim terdapat dalam Alquran surat An-Nisa ayat 35 :



Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (An-Nisa: 35)

Dalam peristiwa tahkim tersebut nyatanya pihak Ali Bin Abi Thalib dirugikan oleh pihak Muawiyah, karena kelicikan dan kecerdikan dari Amr bin Ash yang mengalahkan Abu Musa al-Asyari, maka tahkim dimenangkan oleh pihak Muawiyah yang sangat berniat untuk menguasai kursi khalifah, sedangkan peristiwa tahkim hanya dijadikan alasan bagi Muawiyah, karena jelas Muawiyah khawatir pasti akan kalah dari perang apabila melawan Ali Bin Abi Thalib (Busman Edyar, 2009: 46).

Dari hasil perundingan tahkim tersebut, kedua belah pihak disepakati untuk meletakkan jabatannya demi keutuhan umat. Abu Musa al-Asyari menyetujui untuk meletakkan jabatan Ali sebagai khalifah, begitu pun juga Amr bin Ash menyetujui untuk meletakkan jabatan Muawiyah sebagai gubernur. Akan tetapi nyatanya *tahkim* menjadi kerugian terbesar dipihak Ali, karena Amr bin Ash berhasil mengkhianati Abu Musa al-Asyari¹⁶ dengan tipu muslihat dengan mengukuhkan Muawiyah sebagai khalifah yang siap membalas kematian Ustman Bin Affan yang tidak bisa dilakukan oleh Ali Bin Abi Thalib. (Hitti, 2005: 224)

¹⁶Ketika Abu Musa al-Asyari akan naik ke mimbar dan mengumumkan pemakzulan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, menurut riwayat, seketika Abu Musa dicegat oleh Abdullah bin Abbas, sambil mengingatkan Abu Musa al-Asyari jangan bertindak terlebih dahulu, dan lebih baiknya menunggu Amr bin Ash untuk menyatakan pemakzulan Muawiyah terlebih dahulu, karena Abdullah bin Abbas telah mengetahui kelicikan dari Amr bin Ash. Namun Abu Musa tidak mengindahkan peringatan dari Abdullah bin Abbas, yang akhirnya berujung kekecewaan dari Abu Musa sendiri yang begitu mempercayai Amr Bin Ash

Akibat peristiwa tahkim tersebut, menyebabkan pendukung Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi 2 golongan, yaitu golongan yang sangat fanatik terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yang kemudian dikenal dengan sebutan *Syiah Ali* yang bermakna pihak Ali. Dan golongan *Khawarij* yaitu golongan yang mengklaim tidak memihak kepada Ali maupun kepada Muawiyah, dan kecewa terhadap keputusan Ali untuk mengadakan tahkim yang berakibat ketidakpercayaan mereka kepada Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan (Dedi Supriyadi, 2008: 99).

Munculnya golongan *Khawarij* tidak hanya menyebabkan tentara Ali menjadi lemah akibat pemberontakan yang mereka timbulkan, kelemahan dari pihak Ali Bin Abi Thalib dalam menumpas pemberontakan *Khawarij* digunakan oleh Muawiyah Bin Abu Sufyan untuk merebut dan menguasai Mesir, sehingga membuat kekuatan dan kekuasaan Muawiyah semakin kuat¹⁷, yang kemudian kelak menjadi bahan pertimbangan Ali Bin Abi Thalib untuk terpaksa menyetujui perdamaian dengan Muawiyah. Menurut Ash-Shallabi, (Ash-Shallabi, 2012 : 255) ada beberapa hal yang mendukung keberhasilan Muawiyah, yaitu :

1. Kesibukan Ali Bin Abi Thalib dalam memerangi golongan Khawarij
2. Kekalahan Gubernur Mesir Muhammad bin Abu Bakar yang merupakan utusan Ali Bin Abi Thalib terhadap orang-orang yang menuntut balas atas kematian Ustman.

¹⁷Mesir menjadi tambahan kekuatan yang besar bagi Muawiyah ; kekuatan manusia dan ekonomi. Muawiyah juga mengirimkan delegasi-delegasi ke utara Jazirah Arabia. Makkah dan Madinah dan Yaman.

3. Kesepakatan pendapat dan dukungan antara Muawiyah dengan orang-orang yang menuntut darah Ustman di Mesir.
4. Mesir dari sisi geografisnya lebih dekat ke Syam daripada ke pusat pemerintahan Ali Bin Abi Thalib.
5. Karakter geografis Mesir dengan Syam yang bersambung melalui jalan darat dekat gurun Sinai, yang seolah menjadikan Mesir sebagai bagian dari Syam.

Sekalipun khalifah Ali Bin Abi Thalib telah berusaha keras mengeluarkan segala daya untuk mengatasi gejolak pemberontakan dan kelambanan orang-orangnya, nyatanya membuat khalifah Ali Bin Abi Thalib akhirnya menyetujui Mesir untuk dikuasai oleh Muawiyah. Melalui perjanjian damai, Ali dan Muawiyah sepakat untuk menghentikan peperangan diantara mereka. Muawiyah diberikan kuasa atas Mesir, sedangkan Ali tetap berkuasa di Irak, dan masing-masing pihak tidak menyerang dan tidak memerangin.

Pada tanggal 17 Ramadhan 40 Hijriah atau 24 Januari 661 Masehi, Ali terbunuh oleh seorang *Khawarij* bernama Abd Ar-Rahman Bin Muljan yang ingin membalas dendam karena terbunuhnya sanak keluarganya ketika penumpasan pemberontakan *Khawarij* di Nahrawan. Sewaktu Ali akan ke masjid untuk menunaikan shalat subuh, Abd Ar-Rahman mengayunkan pedang beracun di dahi khalifah Ali Bin Abi Thalib dan tepat mengenai otaknya (Hitti, 2005: 225).

Dengan wafatnya Ali Bin Abi Thalib, akhirnya memberikan perubahan besar pada kelanjutan era peradaban Islam setelahnya. Keruntuhan sistem

Khilafah yang demokratis dengan bergantinya sistem pemerintahan *Monarchi* (kerajaan turun temurun) yang ditandai dengan sejarah kemenangan Muawiyah dalam merebut kekuasaan melawan Ali Bin Abi Thalib dan kemudian mendirikan Dinasti Umayyah sebagai dinasti yang pertama dalam sejarah Islam yang menerapkan konsep kerajaan monarki sebagai simbol pengukuhan kekuasaan.

Kemenangan Muawiyah atas pengingkaran dan penghianatannya terhadap Ali Bin Abi Thalib dengan sengaja menolak memba'iat Ali, berperang melawan Ali dan melakukan perdamaian melalui peristiwa *tahkim* telah memberi keuntungan dan jalan yang lebar kepada Muawiyah dalam memperoleh kekuasaan.

Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, maka jabatan khalifah digantikan oleh putranya Hasan bin Ali selama beberapa bulan, akan tetapi karena tidak didukung oleh pasukan yang kuat dibandingkan dengan pasukan Muawiyah yang kuat, Hasan menyadari betul bahwa keberadaan Muawiyah memang sedang diatas angin. Hasan yang memang tidak menginginkan terjadinya pertempuran dengan Muawiyah bin Abu Sufyan akhirnya menempuh jalan damai dengan Muawiyah yang bertujuan untuk menyatukan kembali umat Islam dan mencegah terjadinya pertumpahan darah. Maka pada tanggal 25 Rabiul Awal 41 Hijriah¹⁸, Hasan meletakkan jabatannya dan memba'iat Muawiyah sebagai khalifah. (Abdussuyafi Muhammad, 2014 : 13)

¹⁸Pada tanggal 25 Rabiul Awal 41 Hijriah Umat Islam merayakan peristiwa besar sebagai tahun persatuan, dengan menyebutnya sebagai *amul-jama'ah* (Tahun Persatuan), dimana umat Islam dipersatukan kembali dibawah kepemimpinan dari Muawiyah bin Abu Sufyan.

Baiat Hasan bin Ali terhadap Muawiyah tersebut mengandung pelajaran yang berharga yang dilatarbelakangi oleh (QS Al-An'am : 153) tentang larangan berselisih (Ash – Shallabi, 2014 : 182).

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

Artinya : “Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan – Ku yang lurus, maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan – jalan (yang lain), karena jalan – jalan itu menceraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa (Al – An'am : 153)

Dengan dibai'atnya Muawiyah sebagai khalifah, maka berakhir sudah masa *Khulafaur Rasyidin* dengan mundurnya Hasan bin Ali dari jabatan khalifah dan digantikan dengan kepemimpinan Muawiyah Bin Abu Sufyan, maka resmi berdiri Dinasti Umayyah. Sebagai khalifah yang baru. Dengan penobatannya, otomatis ibu kota provinsi Suriah, Damaskus berubah menjadi ibu kota kerajaan Islam.

Meskipun telah resmi dinobatkan menjadi khalifah, Muawiyah masih memiliki kekuasaan yang terbatas. Sebagian wilayah masih belum mengakui kekhalifahannya. Penduduk Irak masih menganggap Hasan putra tertua Ali sebagai khalifah penerus Ali Bin Abi Thalib, sedangkan penduduk Mekkah dan Madinah tidak memiliki loyalitas yang kuat terhadap khalifah keturunan Sufyan, karena mereka baru mengakui kenabian Muhammad pada saat penaklukan Mekkah (Hitti, 2002 : 236)

Dipilihnya Damaskus sebagai ibu kota dari Daulah Umayyah, karena posisi Damaskus yang dianggap strategis, berada ditengah-tengah negeri Islam bagian timur yang mencakup Irak dan Persia dan belahan barat yang mencakup Mesir dan Afrika. Di Damaskus juga Muawiyah menemukan tatanan birokrasi dan kekuasaan yang mengakar kokoh. (Ash-Shallabi, 2012 : 344)

Tidak diragukan lagi, bahwa sebagian besar prestasi Dinasti Umayyah adalah penaklukkannya terhadap beberapa kota diberbagai benua, meliputi Asia, Eropa, dan Afrika. Di Asia, Dinasti Umayyah berhasil menaklukan Transoxiana (Asia Tengah), yakni daerah – daerah di yang terletak di sungai Jihun dan sungai Sihun, serta wilayah Sindh (Pakistan) ditambah lagi dengan wilayah-wilayah yang sudah ditaklukan sebelumnya pada masa *Khalifaur Rasyidin*, terutama (Persia, Khurasan, Sijistan, Jirjan, Tibristan, Armenia, Azerbaijan) yang kemudian menjadi wilayah-wilayah utama dalam dunia Islam. Penaklukan-penaklukan pada era Dinasti Umayyah bukan hanya sekedar ekspansi militer, melainkan penaklukan yang bersifat keagamaan, bahasa, dan budaya (Abdussyafi, 2014 : 295).

BAB V

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Tidak bisa dipungkiri, bahwa Dinasti Umayyah telah memberikan kontribusi peradaban dalam sejarah perkembangan khasazah Islam klasik. Kemunculan Dinasti Umayyah, diawali dengan perebutan kekuasaan khalifah antara Muawiyah Bin Abu Sufyan dan Ali Bin Abi Thalib dalam meneruskan tampuk kepemimpinan Islam.

Dimasa kekuasaan dan kepemimpinan Muawiyah Bin Abu Sufyan, sistem pemerintahan Islam mulai mengalami perubahan yang drastis, kehidupan kaum Muslimin yang sebelumnya dibangun berdasarkan majelis syura (musyawarah) kemudian mulai mengalami perubahan, tradisi dalam menentukan khalifah (pemimpin) yang biasanya bersandar pada sistem musyawarah kemudian beralih menjadi sistem monarki (*Sultane/Kingship*).

Pada masa pemerintahannya, agar roda pemerintahan berjalan secara dinamis dan sistematis, kehidupan masyarakat diatur melalui mekanisme birokrasi dengan mendirikan kantor-kantor (*Diwan-diwan*) yang ditujukan untuk mengurus bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Pola administrasi begitu kental mewarnai sistem pemerintahan pada era Muawiyah Bin Abu Sufyan yang secara langsung mengadopsi sistem pemerintahan dari Byzantium.

Maka, dapat disimpulkan, peranan dan kontribusi politik Muawiyah bin Abu Sufyan pada pemerintahan Dinasti Umayyah adalah sebagai berikut :

1. Memindahkan pusat pemerintahan ke dari Madinah ke Damaskus.
2. Mengubah Sistem Pemerintahan Islam yang berlandaskan kepada *Syura* menjadi sistem monarki dengan mengangkat Yazid sebagai putra Makhota.
3. Mendirikan kantor-kantor administrasi pemerintahan, yang berbentuk *diwan – diwan* khusus yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing *diwan* tersebut
4. Mempelopori dibentuknya petugas-petugas keamanan, (ajudan dan pengawal).
5. Dalam keamanan dan bidang kemiliteran, Muawiyah Bin Abu Sufyan membentuk kepolisian, angkatan darat dan angkatan laut yang terdiri dari dua pasukan (pasukan musim panas dan musim dingin)
6. Dalam bidang kemajuan intelektual, Muawiyah bin Abu Sufyan menaruh perhatian lebih pada perkembangan pendidikan, dengan inisiatif mendirikan perpustakaan dan pusat kajian keilmuan, tidak ketinggalan seni sastra terutama syair dan puisi mengalami kemajuan, selain karena syair dan puisi menjadi semacam hiburan, tetapi juga sengaja menjadi alat politik (propaganda) untuk mendukung kebijakan politis Muawiyah bin Abu Sufyan.

B. Saran

1. Dengan mempelajari kekhalifahan Daulah Bani Umayyah dibawah kekuasaan khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan yang telah mencapai puncak kejayaan dalam peradaban Islam, hendaknya kita dapat meningkatkan ukhuwah islamiyah sesama umat islam di Indonesia.
2. Penulis mengharapkan hendaknya setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin bangsa selalu bersikap terbuka dan mau menerima pendapat masyarakat serta memperhatikan nilai-nilai ajaran agama.
3. Penulis mengharapkan agar generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa agar lebih mencintai sejarah. Karena sejarah merupakan cermin bagi manusia. Dengan melihat sejarah masa lalu, dapatlah ditentukan langkah untuk masa kini dan masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah*, Yogyakarta : AR. Ruzz Media. 2007
- Al-Maududi, Abul A'la. *Khilafah Dan Kerajaan*. Bandung : Mizan. 1998.
- Andi Bastoni, Hepi. *Wajah Politik Muwiyah Bin Abu Sufyan*. Bogor : Pustaka Al Bustan. 2012
- Amin, Husayn. Ahmad. *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. 1995
- Budiarjo, Miriam. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia. 1977.
- Edyar, Busman. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta : Pustaka Asatruss. 2009
- Jordac, George. *The Voice Of Human Justice*. Terj Abu Muhammad Assajad. *Suara Kedilan Sosok Agung Ali Bin Abi Thalib (Cetakan 1)*. Lentera : Baristama. 1997
- Fa'al, M, Fahsin. *Sejarah Kekuasaan Islam*. Jakarta : Artha Rivera. 2008.
- Faturrohman, Deden & Wawan Sobri. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang : UMM Press. 2002
- Fletheim, K, Ossip. *Fundamental Of Political Science*. New York : Ronal Press. 1992.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : Universitas Indonesia. 1986.

- Hamka, *Sejarah Umat Islam (Jilid IV)*. Jakarta : Bulan Bintang. 1981
- Hasby, A. M. Fauzy. *Ringkasan Sejarah Islam*, Yogyakarta : Persatuan 1983
- Haque, Atiqul. *Wajah Peradaban (Menelusuri Jejak Pribadi-Pribadi Besar Islam)*. Bandung : Zaman. 1995.
- Hitti, Philip. K. *Dunia Arab, Sejarah Ringkas*, Bnadung : Sumur Bandung. 1971
- Karim, M, Abdul. *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*. Yogyakarta : Pustaka Book Publisher. 2007.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana. 1994
- Ladipus, Ira, M. *Sejarah Sosial Umat Islam (Bagian Satu & Dua)*. Jakarta : PT Grafindo. 1999.
- Mahmudunnasir, Syed. *Islam Konsepsi Dan Sejarahnya*. Bandung : Rosdakarya. 1988
- Munir Amin, Samsul. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta : AMZAH. 2009.
- Nizar, Syamsul. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta : Kencana Press. 2008.
- Osman, A. Latief. *Ringkasan Sejarah Islam*, Jakarta : Widjaya. 1983.
- Syalabi, A. *Sejarah Kebudayaan Islam 2*. Jakarta : Pustaka Al Husna. 2003
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Grafindo. 2000.
- Sulaiman, Rusydi. *Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta : PT Grafindo. 2014

Thohir, Ajid. *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta : PT
Grafindo. 2004.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah I)*. Jakarta : PT
Grafindo. 2000

Qardhawi, Yusuf. *Menelusuri Sejarah Umat Islam*. Jakarta : PT Grafindo. 2005